

**Masyarakat Dalam Wacana *Social Distancing* Pada Surat
Kabar Lokal Jogja (Koran Kedaulatan Rakyat)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia**

Oleh

MUHAMMAD NOVAN HARYA SALAKA

16321020

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

ISLAM

Masyarakat Dalam Wacana *Social Distancing* Pada Surat Kabar Lokal

Jogja (Koran Kedaulatan Rakyat)

Disusun oleh

Muhammad Novan Harya Salaka

16321020

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk
diujikan dan Dipertahankan di hadapan tim penguji
skripsi.

Tanggal: 22 Juli 2021

Dosen Pembimbing Skripsi,



المعتمد على الله والبرهان على القرآن
الجامعة الإسلامية

Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A

NIDN. 0512048302

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**Masyarakat Dalam Wacana *Social Distancing* Pada Surat Kabar Lokal
Jogja (Koran Kedaulatan Rakyat)**

Disusun oleh

Muhammad Novan Harya Salaka

16321020

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 22 Juli 2021

Dewan Penguji:

1. Ketua: Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A
NIDN. 0512048302
2. Anggota: Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A
NIDN. 0520058402



Mengetahui, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Puji Harivanti, S.Sos., M.I.Kom

NIDN 0529098201

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Februari 2022

Penulis,

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp is a 2000 Rupiah stamp with the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code '16.86AJX710597760' is printed at the bottom of the stamp.

(Muhammad Novan Harya Salaka)

NIM 16321020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Akhirnya setelah melalui perjalanan, perjuangan dan doa, penelitian ini dengan judul "Masyarakat Dalam Wacana *Social Distancing* Pada Surat Kabar Lokal Jogja (Koran Kedaulatan Rakyat) dapat diselesaikan oleh penulis guna menambah ilmu pengetahuan serta sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tentunya tidak luput dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memotivasi dan memberikan bantuan dengan tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terkhusus kepada:

1. Bapak Sigit Qodarwiyanta dan Ibu Endah Pratiwi, orangtua penulis, sekaligus sponsor utama dalam menempuh pendidikan hingga sejauh ini. *Matur sembah suwun, Pak/Bu.*
2. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom. selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
4. Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penyusunan tugas akhir ini.
5. Pak Masduki selaku dosen pembimbing akademik.
6. Segenap dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan saya.
7. Segenap staff dan karyawan divisi akademik, perkuliahan dan umum Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia atas bantuan akademis, non-akademis, maupun teknis selama perkuliahan.

8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang memberikan banyak *support* dalam berbagai macam bentuk.
9. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2016 Universitas Islam Indonesia

Penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan penulis sebagai pedoman untuk terus melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Akhir kata, penulis berharap semoga semua kebaikan dan doa yang telah diberikan oleh semua pihak bagi penulis dalam membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini dibalas oleh Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	ix
Bab I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Kerangka Konsep	7
1. Komunikasi Geografi dan Bidang Representasi	7
2. Wacana.....	8
3. <i>Social/Physical Distancing</i> dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	11
G. Kerangka Penelitian	12
H. Metode Penelitian	13
1. Objek dan Lokasi Penelitian	13
2. Teknik Pengumpulan Data	14
3. Teknik Analisis Wacana.....	14
Bab II.....	16
A. Harian Kedaulatan Rakyat	16
B. <i>Social dan Physical Distancing</i>	17
C. Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan	19
D. Unit Analisis Teks.....	19
E. Informan Penelitian	21
Bab III.....	22
A. Temuan	22
1. Analisis Teks	22
2. Analisis Meso.....	41
3. Analisis Makro	43

B. Pembahasan.....	48
1. Pemberitaan KR dan Fungsi Pers.....	48
2. Posisi Masyarakat dalam Kacamata Historis	50
Bab IV	52
A. Kesimpulan	52
B. Keterbatasan Studi	53
C. Rekomendasi	53
Daftar Pustaka	54
Lampiran.....	57

Abstrak

16321020

Salaka, Muhammad Novan Harya (2021). Masyarakat Dalam Wacana *Social Distancing* Pada Surat Kabar Lokal Jogja (Koran Kedaulatan Rakyat). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Media massa, dengan segala kapabilitas dan potensinya, sudah selayaknya ikut berperan serta dalam usaha penanganan bencana yang tengah melanda dunia saat ini, Covid-19. Penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui bagaimana posisi masyarakat sebagai konsumen berita koran KR, terutama dalam kerangka wacana *social/physical distancing*. Menggunakan metode analisis wacana kritis model Fairclough, 5 buah teks berita dianalisis secara mikro (analisis teks), kemudian dikaitkan dengan analisis proses produksinya, hingga akhirnya akan dikaitkan pula dengan konteks sosial-politik dan kesejarahannya dalam ruang Yogyakarta dalam analisis tingkat makro. Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa aspek-aspek non-teks seperti dimensi politik dan kesejarahan turut berperan dalam menentukan bagaimana masyarakat diposisikan dalam wacana ini.

Kata Kunci: wacana, social distancing, konteks sosial-politik, PSBB

Abstract

16321020

Salaka, Muhammad Novan Harya. (2021). 'Public' in The Discourse of Social Distancing in Jogja Local Newspaper (Kedaulatan Rakyat Newspaper). (Bachelor Thesis). Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Social and Cultural Sciences, Universitas Islam Indonesia.

Given its power and potential, mass media must contribute, alongside health workers, to deal with the current worldwide disaster, Covid-19. This study is an attempt to reveal how public, as part of KR news consumers are 'located' in the discourse of social distancing. Using Fairclough's critical discourse analysis model, five texts were analysed in a micro-analysis level (text analysis) to find out how 'public' were represented, how was the production process occurs inside KR, and finally, this study will also talk about how socio-political and historical context in Yogyakarta affected this discourse in macro-analysis level. Finding in this study emphasizes that non-text aspects mentioned earlier has a role in this matter.

Keywords: discourse, social distancing, social-political context, PSBB

Bab I

A. Latar Belakang

Social distancing yang beberapa waktu lalu diumumkan pemerintah sebagai langkah untuk menekan laju penularan COVID-19 menyulut berbagai reaksi dari banyak kalangan. Beberapa menyayangkan bahwa langkah yang diambil ini tak efektif dan masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakannya dengan baik. Padahal laju penularan COVID-19 sangat bergantung pada ketaatan masyarakat, terutama di daerah berpenduduk padat dan mobilitas tinggi.

Menurut laporan dari bbc.com, berbagai negara telah menerapkan langkah penanganan pandemi yang beragam. Korea Selatan, misalnya, melakukan tes masal secara agresif yang mencakup 20.000 penduduknya dalam sehari (tirto.id). Hal ini berguna untuk melacak secara akurat seberapa banyak orang telah terinfeksi. Sementara itu, Vietnam melakukan strategi berupa manajemen kapasitas fasilitas kesehatan disertai komunikasi publik yang transparan (katadata.co.id). Dari cara-cara yang diterapkan berbagai negara, satu yang utama dan direkomendasikan oleh WHO (*World Health Organization*) adalah membatasi bahkan melarang aktivitas yang mengumpulkan kerumunan orang dalam satu tempat sekaligus (*social distancing*).

Menerapkan *social distancing* penting dilakukan selama pandemi karena beberapa alasan, di antaranya adalah: *pertama*, karena penularan dapat terjadi melalui *droplets*; *kedua*, sifat virus Corona yang agresif dengan tingkat penularan yang tinggi dan cepat; *ketiga*, urgensi untuk memutus mata rantai penularan; keempat, isolasi diri selama 14 hari. (liputan6.com)

Indonesia sendiri menerapkan skema yang tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilakukan negara-negara lain dengan nama yang berbeda, yaitu PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Besarnya dampak COVID-19 memaksa keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya, termasuk media. Muqsyith (2020), dalam Jurnal 'Adalah menyebutkan bahwa jurnalis dan pekerja media memegang peranan sebagai penyelamat jiwa.

"Kita membutuhkan pelaporan berita yang berkualitas dan bertanggung jawab, tidak hanya untuk mengidentifikasi informasi yang salah, tetapi juga untuk

memberikan saran kesehatan masyarakat yang sehat dan membangun solidaritas masyarakat.” (Muqsith, 2020)

Dalam jurnal yang sama, klaim tersebut dikuatkan dengan kutipan dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada Hari Kebebasan Pers Sedunia, “Pers memberi penangkal: berita, analisa, memverifikasi, ilmiah, berdasarkan fakta dan verifikasi yang dalam.” (p. 254)

Dalam hal ini, peran media yang pertama adalah penyediaan dan penyebaran informasi. Dalam sebuah laman lembaga studi dan pemantauan media, Remotivi, Olivia Herlinda menyatakan pentingnya peran media yang satu ini “sama pentingnya dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya.” Hal ini berkaitan dengan fungsi informasi tersebut adalah “...agar masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan-keputusan terkait kesehatan diri dan orang-orang di sekitarnya...” (Herlinda, 2020).

Peran penting media yang kedua adalah pada penanaman ide ke dalam benak publik. Penggunaan istilah *social distancing* sebagai upaya pemerintah merupakan hal yang penting dibicarakan dalam kajian wacana, mengingat ia terkait erat dengan bahasa dan prakteknya dalam media.

Menurut Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Dr. Eni Maryani, media mempengaruhi persepsi publik atas krisis pandemi karena hal ini berkaitan dengan informasi yang diperoleh media. (Maulana, 2020)...

Kurangnya efektivitas kebijakan *social distancing* salah satunya adalah karena kurang tegasnya praktek di lapangan. Tidak adanya sanksi yang jelas membuat orang memandang *social distancing* sebagai “sekedar” imbauan, yang artinya ia bisa ditaati, namun bisa pula diabaikan. Pun ketika akhirnya diadakan sanksi, prakteknya masih mengesankan adanya tebang pilih pada individu atau kelompok tertentu. Masyarakat berada pada posisi yang “canggung” dengan tidak adanya pakem PSBB yang tegas dan jelas.

Mengutip salah satu artikel The Conversation, “Jika publik secara keseluruhan menyeriusi *social distancing*, layanan medis tidak akan kewalahan menangani para penderita. Memperlambat dan mengurangi penyebaran penyakit ini ada di tangan kita masing-masing” (theconversation.com).

Pertemuan daring yang dilaksanakan WHO pada Jumat, 20 Maret 2020, menganjurkan untuk menggunakan istilah *physical distancing* ketimbang *social distancing*. Karena menurut WHO, menjaga jarak aman secara fisik bukan berarti melebarkan jarak secara sosial. Sebaliknya, WHO justru menginginkan agar setiap orang tetap terhubung satu sama lain karena menjaga kesehatan mental dalam situasi seperti ini sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Perubahan istilah ini membuktikan gagasan akan pentingnya peran wacana dalam media dan penanaman kesadaran pada publik.

Media (cetak, daring, maupun penyiaran) seharusnya sudah menyadari akan vitalnya peran mereka dalam situasi pandemi. Pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi yang tidak matang atas kedua hal tersebut akan membuat masyarakat semakin rentan. Penelitian ini akan mengambil fokus pada posisi warga masyarakat dalam wacana *social/physical distancing* yang dibentuk oleh media lokal.

Sebuah studi terhadap Harian Jogja dan Tribun menemukan bahwa media lokal yang mempunyai fungsi sebagai sumber informasi yang mendidik, dalam kebijakan redaksionalnya, memprioritaskan agenda pencegahan Covid-19. Kedua media menajamkan aspek-aspek *story selection* Gans yang berbeda, yang terdiri dari: *source consideration*, *substantive considerations*, *product considerations*, *value considerations*, *commercial considerations*, *audience considerations*, dan *political considerations* (Pamungkas & Pramesti, 2021).

Studi lain terkait media lokal, menemukan bahwa *solopos.com*, media lokal *online* yang punya peran besar menyampaikan informasi Covid-19 di kota Solo, dalam membicarakan isu “New Normal” masih didominasi oleh sudut pandang pemerintah (Prabandono & Mawardiningsih, 2020).

Media yang dipilih adalah koran Kedaulatan Rakyat (KR) karena alasan historisnya sebagai media tertua yang masih hidup di Indonesia. Selain itu, basis pembaca yang mencakup wilayah DIY dan Jawa Tengah sudah sangat familiar dengan Kedaulatan Rakyat.

Koran KR, dalam pemberitaannya pun tidak absen dalam perbincangan *social distancing*. Salah satunya adalah yang muncul dalam laman daringnya, *krjogja.com*. Dalam diskusi yang dilakukan secara *online* oleh Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta pada Sabtu, 21 Maret 2020 menyimpulkan “Social Distancing menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi penyebaran,”

Pemberitaan lain terkait *social distancing* adalah persiapan pembentukan peraturan oleh gubernur DIY. Selain persoalan menjaga jarak, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengungkapkan harapannya akan ketaatan masyarakat. “Kita akan mencoba, bagaimana masyarakat ini bisa menjaga diri tertib. Kalau antre misalnya di bioskop atau beli tiket kereta dan lain sebagainya ya satu meter minimal, tidak empet-empetan” (krjogja.com).

Penelitian ini akan mengidentifikasi posisi “masyarakat” pada representasi wacana *physical distancing* surat kabar lokal dan bagaimana tendensi tersebut selaras dengan ideologi pada praktek wacana. Lalu, mengapa aspek ideologi menjadi penting dalam pembacaan *physical distancing*?

Pertama, karena teks (*writing*) adalah representasi. Melihat teks sebagai representasi berbeda dengan melihat realitas. Produksi teks akan selalu berkaitan dengan keputusan-keputusan untuk menginterpretasi and merepresentasikannya dengan suatu cara ketimbang yang lain (Fairclough, 1995). Dengan kata lain, akan selalu ada satu pemaknaan yang dominan atas pemaknaan yang lain, pada bagian inilah ideologi menjadi penting untuk diamati dalam pewacanaan *social distancing*.

Kedua, karena wacana adalah bentuk dari praktek sosial. Ia berkontribusi dalam membentuk dunia sosial. Tindakan-tindakan dalam praktek sosial dipandang terlembagakan dan terikat sehingga membentuk suatu pola-pola tertentu. Analisis wacana Fairclough memberikan konsep wacana untuk teks, pembicaraan, dan sistem semiologis (Jorgensen & Phillips, 2017).

Dalam kajian komunikasi geografi, adalah penting untuk memahami bagaimana media membentuk keruangan masyarakat. *Social/physical distancing* di media adalah problem yang menyangkut masalah tentang aspek “representasi” dalam komunikasi geografi. Ruang, dalam komunikasi geografi tidak terbatas pada bentuk dan batas-batas yang konkret, namun juga adalah ruang abstrak yang memiliki batas-batas imajiner. Ruang, selain bentuk materialnya, juga adalah tindakan sosial yang terjadi di dalamnya.

Salah satu bidang kaji yang diusulkan Paul C. Adams dalam komunikasi geografi adalah “representasi”. Secara singkat, representasi adalah bagaimana tempat direpresentasikan dalam proses komunikasi (*place-in-communication*). Pengetahuan orang mengenai suatu tempat ditentukan oleh bagaimana tempat itu dimunculkan dalam media.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ideologi *physical distancing* di media lokal Yogya, Kedaulatan Rakyat. Ideologi media, menurut Norman Fairclough dapat dicari dalam tiga dimensi: teks, produksi teks dan konteks sosial politik. Dalam hal ini, maka bagaimana masyarakat ditempatkan dalam pewacanaan *social/physical distancing* tidaklah muncul secara tiba-tiba begitu saja. Maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana masyarakat direpresentasikan dalam teks terkait *physical distancing* oleh Kedaulatan Rakyat?
2. Bagaimana masyarakat diposisikan dalam produksi teks berita *physical distancing*?
3. Bagaimana posisi masyarakat dalam konteks sosial-politik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui representasi masyarakat dalam teks berita terkait *physical distancing* oleh Kedaulatan Rakyat.
2. Mengetahui posisi masyarakat dalam produksi teks berita terkait *physical distancing* oleh Kedaulatan Rakyat.
3. Mengetahui konteks sosial-politik posisi masyarakat *physical distancing* Kedaulatan Rakyat dalam konteks sosial politik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis
Memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai analisis wacana dalam sebuah media serta memberi pemahaman terkait bentuk kebijakan yang berdampak pada perbedaan penafsiran.
2. Manfaat praktis
Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi di kemudian hari dalam kajian wacana kritis serta memberikan wawasan yang lebih luas di bidang ilmu komunikasi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ar-Rasyid dan Yuniati (2020) berikut patut dicatat sebagai rujukan awal dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk mengetahui

bagaimana realitas dikonstruksi pada teks berita berjudul “*PSBB Jabar Dihentikan, Ridwan Kamil: 100 Persen Daerah Siap AKB*” pada situs media *online*, detik.com. (Ar-Rasyid & Yuniati, 2020)

Temuan analisis teks dalam penelitian ini menunjukkan bahwa detik.com sangat memperhatikan teknik pemilihan kata dan penyebutan narasumber yang berfungsi untuk *pertama*, memperhalus dan memberikan kesan positif pada kebijakan PSBB; *kedua* mempertegas pernyataan pada paragraf-paragraf sebelumnya; dan *ketiga* adalah dalam rangka membangun citra penguasa, yaitu Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat.

Rujukan selanjutnya terdapat dalam studi yang dilakukan oleh YinYan Wang (2021) berikut. Menggunakan metode yang sama dengan Ar-Rasyid & Yuniati, Wang yang mendasarkan metode analisis wacana kritisnya dari sistem tata bahasa Halliday, menemukan bahwa terdapat persamaan pada dua institusi media dalam membicarakan isu Covid-19. Kedua media yang dimaksud adalah *People’s Daily*—yang merupakan media *mainstream* milik pemerintah China, dan *The New York Times*—media milik Amerika Serikat yang pada taraf tertentu, diakui pengaruhnya secara global. Dalam temuan Wang, kedua institusi media ini sama-sama membicarakan isu Covid-19 dengan istilah-istilah yang “negatif dan merendahkan.” Sementara itu, perbedaan yang ditemukan di kedua media terletak pada fokus pemberitaannya, yang menurut Wang disebabkan oleh perbedaan ideologis keduanya yang berakar dari perbedaan budaya. (Wang, 2021)

Senada dengan penelitian Ar-Rasyid & Yuniati, Wang juga menemukan kecenderungan bahwa media memiliki perhatian terhadap pemilihan kata. “*According to Halliday’s systemic functional grammar, vocabulary selection is inseparable from the classification system. In the news discourse, the writer chooses different words to have different effects on the same event.*” (p. 53)

Kedua, penelitian Wang juga menunjukkan bahwa aspek non-wacana seperti aspek politik dan budaya kedua media di negara yang berbeda berpengaruh terhadap corak ideologi pewacanaan pada masing-masing media.

Beberapa literatur lain, secara tak langsung telah menyinggung bagaimana “masyarakat” ditempatkan dalam posisi yang strategis dalam wacana *social distancing*, *physical distancing*, maupun PSBB. Herdiana (2020), misalnya, menyatakan bahwa 3 hal yang menghambat penerapan kebijakan *social distancing*, salah satunya adalah faktor ketaatan komunitas masyarakat, di samping problem kapabilitas dan tak sinkronnya

kebijakan pemerintah pusat dan daerah (Herdiana, 2020). Penelitian ini menyiratkan bahwa masyarakat dan ketaatannya ditempatkan sebagai faktor yang menghambat jalannya PSBB.

Argumen lain terkait kepatuhan masyarakat sebagai elemen penting dalam mengontrol Covid-19 disampaikan oleh Yanti dkk (2020). Ia mengaitkan kepatuhan masyarakat dalam hubungannya dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap penerapan *social distancing* (Yanti, et al., 2020).

Dalam hubungannya dengan media, Rusi dkk (2020) secara spesifik menyinggung soal pentingnya peran media sebagai alat yang digunakan pemerintah dalam pembentukan opini publik mengenai PSBB (Rusi, Ujiantuti, & Nahar, 2020).

Selain penelitian dan jurnal ilmiah, peneliti juga mengambil referensi dari tulisan ilmiah populer sebagai landasan. Temuan dalam *The Conversation* mengungkapkan bahwa dalam konteks Indonesia, aspek budaya rupanya berpengaruh dalam respon masyarakat terhadap wabah yang melanda. Salah satunya adalah keterlibatan pemimpin agama yang mengimbau agar ibadah dilakukan di rumah mengingat cepatnya persebaran virus.

F. Kerangka Konsep

1. Komunikasi Geografi dan Bidang Representasi

Ruang adalah produk dari kehidupan sosial, dan bukan hanya tempat dimana kehidupan berlangsung. Komunikasi terjadi di dalam ruang, yang pada gilirannya, memberikan konteks dalam proses komunikasi. Komunikasi geografi adalah sebuah perwujudan bagaimana unsur-unsur komunikasi (konteks dan teks) berkorelasi dengan unsur-unsur geografi (ruang dan tempat).

Komunikasi geografi adalah studi komunikasi yang berfokus pada bagaimana komunikasi memproduksi ruang dan bagaimana ruang memproduksi komunikasi. Ia disebut “komunikasi geografi” ketimbang “media geografi” karena komunikasi dianggap lebih umum dimana media berada di dalamnya, di samping hal-hal penting lain seperti tanda, simbol, sinyal, dan bahasa (Dhona, 2018, p. 3).

Sifat multidisiplin komunikasi membuat hubungan komunikasi dan geografi ternyata lebih tua dibanding disiplin ‘komunikasi’ sendiri. Menurut para sejarawan, studi komunikasi pada abad ke-19 mencakup ranah transportasi jalan dan rel kereta api. Hal tersebut dikarenakan teknologi interaksi manusia masih terbatas pada percetakan dan alat

transportasi. Komunikasi berpisah secara efektif dengan transportasi ketika teknologi telegram ditemukan. Untuk pertama kali dalam sejarah, pesan berpindah lebih cepat dari perpindahan secara fisik. Sementara itu bidang geografi masih konsisten dengan transportasi.

Ruang atau tempat tidaklah selamanya alamiah atau stabil. Gagasan ini berbeda dengan gagasan geografi klasik yang menganggap ruang adalah tetap dan stabil. Penganut geografi klasik tidak sepakat bahwa representasi ruang melalui media/mediasi adalah ruang itu sendiri. Para sarjana komunikasi geografi justru menerima kenyataan bahwa mediasi sebuah ruang dapat memproduksi keruangan tertentu dan menentukan bagaimana manusia memperlakukan ruang.

Untuk memahami bagaimana perspektif geografi dalam kontribusinya terhadap studi komunikasi, perlu dibahas secara singkat terlebih dahulu bagaimana tahapan sejarah riset komunikasi dalam melihat dan memperlakukan ruang. Dhona menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, riset dalam studi komunikasi melalui 3 tahap pendekatan, secara berurutan, pendekatan-pendekatan tersebut yaitu transmisi, lalu pendekatan ritual atau disebut juga pendekatan kontekstual, dan ketiga adalah pendekatan spasial (hal. 6).

Pertama adalah tahap transmisi (ruang hanya sebagai tempat terjadinya proses komunikasi), lalu pendekatan ritual (ruang mulai diperhitungkan sebagai faktor pemberi makna pesan/kontekstual), dan terakhir adalah pendekatan spasial (ruang itu tidak tetap dan sesuatu yang dinegosiasikan oleh teknologi media).

Praktik kewacanaan sebagai salah satu bentuk aktivitas sosial membentuk sebuah konteks “keruangan” dimana keberadaan Sultan menjadi sosok sentral. Dengan bantuan media massa, ia dapat menentukan bagaimana posisi masyarakat dalam pembentukan wacana *social/physical distancing*. Problem-problem *social distancing* terkait kepatuhan dan sejenisnya dapat diutarakan penguasa kepada masyarakat, namun melalui *platform* yang sama, masyarakat tak bisa dengan leluasa membicarakan kepatuhan kepada penguasa.

Paul C. Adams, dalam *Taxonomy for Communication Geography*, mengusulkan 4 bidang kaji dalam komunikasi geografi, yaitu *communication in space*; *space in communication*; *place in communication*; dan *communication in place*.

2. Wacana

Wacana adalah praktik sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap dalam pembicaraan, tulisan, gambar, diagram, film atau musik. Oleh karenanya, praktek kewacanaan sebagai praktik sosial ikut berkontribusi dalam terbentuknya hubungan dan

identitas-identitas sosial. Namun, perlu diingat pula bahwa wacana pun berada dalam hubungan dialektik dengan dimensi sosial lain. Artinya adalah bahwa selain kontribusinya dalam membentuk hubungan dan identitas sosial, wacana juga merefleksikan hubungan dan identitas dalam sosio-kultur masyarakat.

a. Teks

Sebelum lebih jauh membicarakan wacana, bagaimana Halliday melihat teks nampaknya perlu peneliti sampaikan terlebih dulu untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengingat peran akan gagasannya yang cukup signifikan dalam analisis wacana kritis model Fairclough yang peneliti gunakan. Pengaruh yang peneliti maksud, terutama terletak pada bagaimana CDA Fairclough memperlakukan dan menganalisis teks.

Halliday dalam Santoso, memaknai teks sebagai bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi tertentu. Teks berkaitan dengan apa yang secara aktual “dilakukan”, “dimaknai”, dan “dikatakan” masyarakat. Teks adalah suatu cara pengungkapan makna lewat tulisan atau lisan, atau sebagai suatu pilihan semantik dalam konteks sosial, mengutip artikel Santoso, “Semua bahasa yang hidup yang mengambil bagian tertentu dalam konteks situasi dinamakan teks” (Santoso, 2008, p. 3).

Terkait dengan teks, Halliday menerangkannya sebagai berikut: *Pertama*, teks adalah unit semantik. *Kedua*, teks dapat memproyeksikan makna pada level yang lebih tinggi. *Ketiga*, teks adalah proses sosiosemantik atau dengan kata lain, teks adalah proses sosiologis. *Keempat*, situasi adalah faktor penentu teks. Makna diciptakan sistem sosial dan dipertukarkan oleh anggota masyarakat dalam wujud teks, dan sebaliknya, perubahan dalam sistem sosial akan terefleksi dalam teks. Makna tidak diciptakan dalam keadaan terisolasi dari lingkungan “situasi” nya.

Analisis wacana kritis adalah tentang hubungan dialektis antara elemen simbol semiosis, yang dalam hal ini terdiri dari bahasa dan elemen-elemen lain dalam praktik sosial. Wodak dan Meyer (2001) menyebutkan elemen-elemen praktik sosial, di antaranya adalah aktivitas produktif, alat produksi, relasi sosial, identitas sosial, nilai budaya, kesadaran, dan semiosis (Wodak & Meyer, 2001, p. 122).

Analisis wacana kritis Fairclough dalam... adalah bersifat “kritis”, yang dalam pengertian ini, berarti mengungkap peran praktik kewacanaan dalam komunitas masyarakat, termasuk yang melibatkan relasi kuasa yang timpang. Dalam pemahaman Fairclough, wacana dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu: teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Pertama, wacana mengkonstruksi identitas sosial dan posisi subjek. Kedua, ia

membantu membangun relasi sosial di antara orang-orang. Ketiga, ia membangun sistem pengetahuan dan kepercayaan.

Fairclough menduga, ada hubungan kuat antara teks, bagaimana ia diproduksi dan dimaknai, serta konteks praktik sosialnya. Analisis wacana kritis, kemudian dilihat sebagai proses integratif antara analisis teks, analisis proses produksi, konsumsi, dan distribusi teks, serta analisis sosio-kultural dari peristiwa diskursif.

Ketiga dimensi inilah yang kemudian memberikan fungsi pada bahasa dan pemaknaannya terhadap identitas, relasi, dan fungsi ideasional bahasa. Analisis model Fairclough berpusat salah satunya pada teks. Analisis teks memiliki hubungan kuat dengan analisis kebahasaan yang digunakan orang sehari-hari.

b. Ideologi

Ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif berdasarkan kenyataan jika mayoritas menganggap hal tersebut sebagai suatu kebenaran. Sebuah teks pada dasarnya tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi konsumen/pembaca ke arah suatu ideologi.

Ideologi dilihat sebagai aspek yang penting dalam membangun dan mempertahankan relasi kuasa, oleh karenanya, perspektif menjadi penting dalam CDA. Umumnya, CDA memilih perspektif dari pihak-pihak yang dilemahkan dan menganalisis penggunaan bahasa oleh pihak-pihak yang berkuasa melalui teks.

Dalam *Critical Discourse Analysis*, ideologi bersemayam di dalam struktur dan praktik bahasa, termasuk bentuk dan gaya linguistik seperti 'konten'. Bahasa adalah bentuk material ideologi, dan bahasa ditanamkan oleh ideologi. Makna diproduksi melalui interpretasi sebuah teks dan teks sangat terbuka pada bermacam-macam interpretasi. Karena proses ideologis berhubungan dengan diskursus sebagai keseluruhan aktivitas sosial (Fairclough, 1995, p. 71).

Fairclough menjelaskan bahwa ideologi merupakan makna yang melayani kekuasaan. Lebih tepatnya, memahami bahwa ideologi sebagai pengkonstruksi makna yang memberikan kontribusi bagi produksi, reproduksi, dan transformasi hubungan-hubungan dominasi. Fairclough percaya bahwa orang dapat diposisikan dalam ideologi-ideologi yang berbeda dan saling bersaing. Ideologi bersemayam dalam teks, didalamnya terdapat jejak-

jejak ideologi, maka tidak mungkin melepaskan ideologi dari teks. Hal ini karena makna diproduksi melalui representasi teks, dan ia terbuka atas berbagai macam interpretasi, dan karena proses ideologis berhubungan dengan wacana sebagai keseluruhan proses sosial. adalah proses dalam masyarakat, bukan dalam proses produksi, konsumsi, dan distribusi teks.

3. *Social/Physical Distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dengan mempertimbangkan sifat COVID-19 yang *highly-infectious*, WHO melalui pertemuan yang diadakan secara daring pada Maret tahun lalu mengusulkan langkah penanganan dengan membatasi dengan ketat kontak secara fisik dengan orang lain. *Social distancing*, adalah istilah yang digunakan WHO pada pertemuan tersebut. WHO merekomendasikan usulan ini agar diikuti oleh semua negara.

WHO, pada Maret 2020 meluncurkan kampanye kesadaran dan mengusulkan 5 langkah untuk menangani COVID-19. Berfokus pada mencuci tangan, etika batuk, tidak menyentuh wajah, *physical distancing*, dan tetap di rumah bila kondisi sedang kurang sehat.

Penjelasan mengenai *physical/social distancing* dan PSBB akan dibahas dengan rujukan dari instrumen hukum pemerintahan Indonesia secara eksklusif. Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai definisi PSBB, landasan hukum yang dipakai, UU yang menjadi pedomannya, asas, dan prosedur pelaksanaannya.

Sebagai pengantar, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bukanlah istilah yang sama sekali baru. Nyatanya, istilah ini telah disebut pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, tepatnya pada Bab V pasal 15. Selain UU Nomor 6, istilah PSBB juga telah muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, yang 3 hari kemudian, yaitu pada 3 April terbit aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

UU Keekarantinaan Kesehatan disahkan pada tahun 2018 oleh presiden RI Joko Widodo yang kemudian dipakai sebagai pedoman untuk Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9 yang disahkan pada tahun 2020 oleh Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto disusun dengan pertimbangan yang sangat

khusus, yaitu menanggulangi COVID-19 yang sedang mewabah dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua kebijakan ini memiliki sedikit perbedaan dalam teksnya ketika mendefinisikan PSBB. Perhatikan kedua kutipan berikut:

“Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.” (UU No. 6 Tahun 2018)

“Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).” (Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020)

Aturan pada UU No. 6 diperjelas oleh Peraturan Menteri Kesehatan dalam ketentuan umum dengan menyebut nama penyakit/faktor penyebab Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sebelumnya belum tertulis dalam UU.

G. Kerangka Penelitian



H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (CDA) tiga dimensi model Fairclough untuk mencari tahu hubungan antara teks, praktek diskursus (produksi, konsumsi, dan distribusi teks), dan aspek sosio-kulturalnya. Data dalam penelitian ini adalah teks berita pada surat kabar lokal Kedaulatan Rakyat yang menyinggung soal pembatasan sosial, *social distancing*, *physical distancing*, dan akan mengambil rentang waktu mulai bulan Maret, dimana kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan.

1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah teks pemberitaan mengenai pembatasan sosial yang dirilis/dimuat di koran Kedaulatan Rakyat. Koran Kedaulatan Rakyat dipilih karena KR adalah media massa tertua di Indonesia. Kedua, karena KR memiliki basis pembaca yang

luas, yaitu mencakup wilayah DIY dan Jawa Tengah dimana penduduk di kedua wilayah tersebut telah familiar dengan koran KR.

2. Teknik Pengumpulan Data

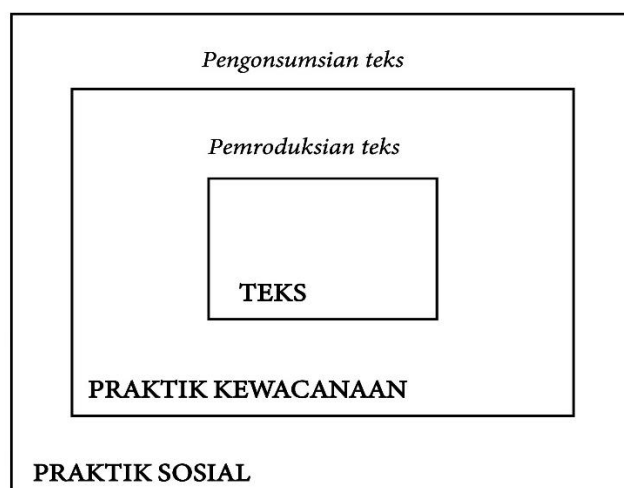
a. Wawancara

b. Studi Pustaka

Studi yang dilakukan akan mengambil data yang bersumber dari dokumen publik (koran). Hal ini dilakukan karena data dapat diakses kapan saja (lebih fleksibel) dan dapat melihat/membaca secara langsung bahasa dan kata-kata tekstual. Konten-konten media cetak dipilih dengan memilih dan memilah berita *headline* serta satu artikel dari kolom Analisis KR dengan kata kunci “jaga jarak”, “*social distancing*”, “*physical distancing*”, dan “PSBB”. Dengan mengambil rentang waktu mulai dari Maret 2020 hingga Agustus 2020. Pengambilan sampel difokuskan pada 2 bulan pertama ketika sedang gencar-gencarnya kata kunci tersebut digunakan secara masif.

3. Teknik Analisis Wacana

Dalam *Analisis Wacana*, Fairclough melihat bahwa penggunaan bahasa merupakan peristiwa komunikatif yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial (Jorgensen & Phillips, 2017, p. 128). Penelitian ini akan berpedoman pada ketiga fungsi ini untuk melihat bagaimana *social distancing* diwacanakan dalam koran Kedaulatan Rakyat.



Gambar 3.1

1. Teks

Analisis pada teks memusatkan kosakata, tata bahasa, dan koherensi kalimat untuk mewujudkan wacana dan aliran secara linguistik. Wacana dan aliran tersebutlah yang kemudian menghasilkan teks yang digunakan penerimanya untuk melakukan interpretasi.

Posisi “masyarakat” dalam wacana *Social distancing* pada teks dalam koran KR akan diuraikan secara kebahasaan dan dianalisis hubungannya dengan praktek sosial.

2. Praktik Wacana

Praktik wacana berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Maka pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan menyelidiki kondisi pemroduksian surat kabar.

Peneliti dalam hal ini mencari tahu proses produksi berita yang dianalisis untuk mengetahui bagaimana struktur dan isinya ditransformasikan menjadi teks.

3. Praktik Sosial

Tujuan yang hendak dicapai dalam tahap ini adalah memetakan hubungan sosial-budaya yang menyusun konteks kewacanaan.

Dalam tahap ini, akan dicari tahu bagaimana konteks sosial-budaya lokal Jogja merespon wacana *social distancing* dalam koran KR.

Bab II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Harian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat (KR) adalah surat kabar yang berkantor di Yogyakarta, tepatnya berada di alamat Jl. P Mangkubumi No. 40-44 Yogyakarta. Berdiri pada 1945 dan merupakan salah satu koran tertua di Indonesia. Koran KR, bersama dengan koran *Merapi*, *Minggu Pagi*, *Swara Kampus*, *KR Radio*, *krjogja.com* dan *channel Youtube Kedaulatan Rakyat TV* adalah media massa-media massa yang berada di bawah naungan PT Badan Penerbitan (BP) Kedaulatan Rakyat Group.

Koran yang sangat lekat dengan warga Jogja ini dirintis berdirinya oleh H. Samawi dan Madikin Wonohito. Karena kedekatannya dengan orang Jogja, Hamad dalam *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* (2004) bahkan menyebut KR sebagai “koran orang Yogya” (Hamad, 2004, p. 5). Surat kabar yang memiliki sejarah panjang ini telah menjadi saksi dalam berbagai peristiwa bersejarah bangsa yang kita kenal Indonesia ini. KR merupakan salah satu surat kabar tertua di

Indonesia, pernah berganti fungsi, dan berganti-ganti nama.



Pernah Menjadi Media Propaganda Jepang

Edisi perdananya yang berjudul “Kekoeasaan Pemerintah Daerah Djogdjakarta” dengan subjudul “Seloeroehnja di Tangan Bangsa Indonesia” dicetak sebanyak 1.000 eksemplar dan diedarkan ke seluruh Jogjakarta. Kedaulatan Rakjat, pada 1972

menyesuaikan dengan EYD dan menjadi “Kedaulatan Rakyat” yang masih dipakai hingga sekarang.

Struktur redaksional KR pertama mencatatkan nama Bramono sebagai pemimpin umum, Soemantoro sebagai pemimpin redaksi, dan Samawi sebagai wakil pemimpin redaksi. Namun KR kemudian ditinggalkan beberapa redaktornya seperti Bramono yang mengundurkan diri dan mendirikan *Soerjo Tjondro*. Kemudian Soeprijo Djojosoepadmo menjadi redaktur harian *Hidoep* dan menjadi pimpinan redaksi *Harian Merdeka*. Setelah itu, digandenglah wartawan senior yang dulunya adalah wartawan keliling yang melaporkan pertempuran di daerah-daerah pada tahun 1948, Madikin Wonohito.

Kedaulatan Rakyat Kini

Kedaulatan rakyat kini telah maju seiring perkembangan zaman. Selain koran cetak, KR kini memiliki radio dan *platform-platform* di dunia maya, mulai dari *website* sampai media sosial, yakni Facebook, Twitter, Youtube, hingga Tiktok.

Jajaran Redaksi Kedaulatan Rakyat Kini

Pemimpin Umum	: M Wirmon Samawi, S.E, M.I.B
Pemimpin Redaksi	: Drs Octo Lampito Mpd
Wakil Pemimpin Redaksi	: Ronny Sugiantoro SE MM; Drs H Ahmad Lutfi MA
Redaktur Pelaksana	: Primaswolo Sudjono SPt; Mussahada; Joko Budiarto
Staff Redaktur	: Tomi Sujatmiko; Ivan Aditya; Agus Sigit Cahyana; Danar Widiyanto

B. Social dan Physical Distancing

Dalam penelitian ini, istilah *social distancing* dan *physical distancing* akan dipakai secara bergantian karena memiliki esensi yang sama. Berikut akan peneliti rangkum beberapa dari definisinya yang dikutip langsung dari berbagai literatur.

Katie Pearce (2020): “*Social distancing is a public health practice that aims to prevent sick people from coming in close contact with healthy people in order to reduce opportunities for disease transmission. It can include large-scale measures like canceling group events or closing public spaces, as well as individual decisions such as avoiding crowds.*” (John Hopkins University Hub)

Lisa Maragakis (2020): “*The practice of social distancing means staying home and away from others as much as possible to help prevent spread of COVID-19. The practice of social distancing encourages the use of things such as online video and phone communication instead of in-person contact.*” (hopkinsmedicine.org)

Alodokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020): “*Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain.*” (alodokter.com)

Kutipan-kutipan tersebut mendefinisikan *social distancing* sebagai praktik kesehatan yang berfungsi untuk mencegah orang yang sakit untuk berdekatan dengan orang yang sehat dalam rangka mengurangi transmisi/penyebaran penyakit. Dari kutipan-kutipan tersebut, penekanan ditujukan pada menjauhi dan menghindari kontak langsung (*close contact*), tempat ramai, dan berkerumun (*avoiding crowds*). Tujuan dari melakukan *social distancing* ada dua, yaitu mengurangi potensi terinfeksi pada komunitas yang rawan dan mengurangi beban pada sistem beserta tenaga kesehatan.

Istilah *social distancing* maupun *physical distancing* di Indonesia dikonversi menjadi suatu kebijakan dengan nama lain, yakni PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang pada nyatanya bukanlah istilah baru.

Terkait dengan kebijakan, Yogyakarta sendiri di dalam peraturan daerahnya, belum mengatur definisi untuk istilah *social distancing* dan *physical distancing*. Meski demikian, Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 8 tahun 2010 tentang

Penanggulangan Bencana telah mengatur hal-hal yang secara esensi mirip dengan istilah-istilah tersebut, yakni karantina.

C. Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan

Peraturan mengenai mekanisme penanganan suatu peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat telah dibentuk pada tahun 2018 melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan oleh presiden RI Joko Widodo. Dalam UU inilah, istilah PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pertama kali muncul, yang kemudian dibuatkan kebijakan tersendiri di kemudian hari, tepatnya pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020.

UU Kekarantinaan Kesehatan, pada intinya disusun dengan tujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal penyakit atau faktor resiko penyebab Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan ketahanan nasional dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Peraturan ini, kemudian dipakai sebagai pedoman untuk Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Status tanggap darurat DIY diberlakukan pertama kali pada 20 Maret hingga 29 Mei 2020 (tempo.co). Melalui penetapan status tersebut, sesuai dengan Perda DIY Nomor 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam status keadaan darurat memiliki kemudahan dalam akses imigrasi, cukai, dan karantina. Sikap DIY untuk merujuk langkah-langkah penanganannya dengan Perda ketimbang PMK dapat dipahami mengingat mekanisme penetapan PSBB mengharuskan daerah-daerah untuk melakukan pengajuan terlebih dahulu hingga mendapat persetujuan dari menteri kesehatan.

D. Unit Analisis Teks

Sub-bab ini berisi judul-judul produk jurnalistik Harian Kedaulatan Rakyat yang akan menjadi bahan analisis teks beserta deskripsi singkat tentang isinya. Dalam Juwito (2008), produk jurnalistik meliputi 2 dari 3 kelompok, yaitu berita

(*news*) dan opini (*views*). Sementara itu, iklan (*advertising*) bukanlah produk jurnalistik. (p. 5)

Selain teks berita, peneliti juga memasukkan salah satu artikel dari kolom “Analisis KR” sebagai unit analisis. “Kolom” merupakan salah satu produk jurnalistik yang merujuk pada opini singkat yang lebih menekankan pada aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan. (p. 13)

Produk-produk jurnalistik untuk analisis teks dipilih dengan memilih dan memilah berita *headline* serta satu buah artikel dari kolom Analisis KR menggunakan kata kunci “jaga jarak”, “*social distancing*”, “*physical distancing*”, dan “PSBB” pada tubuh teks. Dengan mengambil rentang waktu mulai dari Maret 2020 hingga Agustus 2020. Judul dan edisi terbitnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tanggal	Judul
1.	Edisi 15 Juni 2020	Sultan Jawab Pertanyaan Netizen Normal Baru di DIY Bertahap
2.	Edisi 08 Mei 2020	Ruang Sosial
3.	Edisi 10 Mei 2020	Penyerahan BST di Kulonprogo Warga Antusias, Abaikan ‘Jaga Jarak’
4.	Edisi 08 April 2020	Jakarta Siapkan Penegakan Hukum DIY Lakukan Prosedur PSBB
5.	Edisi 30 Mei 2020	Sultan: Bukan Berarti Bisa Bebas 60 Porsen Warga DIY Setuju ‘New Normal’

Tabel 2.1

Teks pertama adalah tentang penjabaran Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur Yogyakarta tentang tahap-tahap persiapan pelaksanaan Normal Baru di DIY. Bagaimana Normal Baru diperlakukan oleh teks akan nampak pada berita pertama ini.

Teks kedua merupakan opini yang ditulis oleh Dr Sutaryono, seorang dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas

Geografi UGM. Artikel yang dimuat di kolom “Analisis KR” ini adalah tentang pengamatan penulis sebagai akademisi dan temuan-temuannya soal penanganan Covid-19 di lapangan yang menurutnya masih memiliki beberapa masalah yang harus dibereskan.

Liputan pada acara kegiatan pembagian bantuan sosial tunai (BST) di Kulonprogo adalah isi berita ketiga. Teks berita ini memperlihatkan bagaimana protokol “jaga jarak” yang diabaikan oleh masyarakat dan kurangnya koordinasi oleh pihak penyelenggara.

Teks keempat adalah tentang bagaimana kondisi PSBB DIY dan membandingkannya dengan Jakarta. Berita keempat ini adalah kekhawatiran menjelang arus mudik dan perhatian Sri Sultan terhadap dampak aspek ekonomi Covid-19.

Teks kelima adalah publikasi hasil survey yang digelar oleh Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM tentang persepsi masyarakat DIY terkait upaya penanganan Covid-19 dan penerapan ‘New Normal’. Teks berita ini juga meliput tentang upaya kampanye New Normal berwujud lomba yang diadakan kementerian.

E. Informan Penelitian

- Octo Lampito (Pimpinan Redaksi Kedaulatan Rakyat)

Beliau adalah jurnalis dan merupakan pemimpin redaksi Harian Kedaulatan Rakyat yang berkantor di Yogyakarta. Beliau juga merupakan anggota Dewan Kebudayaan DIY. Pernah menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Yogyakarta selama dua periode.

Bab III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

Temuan pada penelitian ini berusaha menguak bagaimana warga masyarakat diposisikan dalam wacana *physical/social distancing* oleh Kedaulatan Rakyat dengan menggunakan instrumen analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Pembacaan yang mendalam pada teks berita dilakukan untuk memeriksa, 1) bagaimana “masyarakat” dalam wacana *physical/social distancing* direpresentasikan; 2) bagaimana relasi yang terbentuk berdasarkan representasi tersebut; dan 3) bagaimana identitas masyarakat atas wacana *physical/social distancing* dibangun.

Setelah itu, akan dikaitkan dengan analisis proses produksi teks beritanya (analisis meso) dan pada juga pada konteks sosial-politiknya (analisis makro).

1. Analisis Teks

Teks 1: Sultan Jawab Pertanyaan Netizen Normal Baru di DIY Bertahap [15 Juni 2020, hal. 1]

(Ria/Ira)-f

Representasi “masyarakat” Dalam Teks Berita

Teks berita berusaha menunjukkan bahwa Pemda DIY yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur Sri Pakualaman X bersama dengan tim gugus tugas DIY telah memiliki langkah dan prosedur persiapan menjelang pelaksanaan kenormalan baru. Sultan menjabarkan setidaknya 5 tahapan yang penting diperhatikan sebelum penerapan normal baru di DIY.

Penjabaran kelima tahap persiapan dilakukan dengan cukup mendetail, mulai dari prakondisi, *timing* pelaksanaan, prioritas (merujuk pada pemilihan daerah/sector yang telah siap melaksanakan), koordinasi pusat dan daerah, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi.

Terkait persiapan, fokus dan penekanan dari pemerintah ada pada peran serta masyarakat di dalamnya. Dalam teks berita ini, kata “kesadaran masyarakat” disebut berulang kali.

“Karena sukses tidaknya rencana implementasi new normal tergantung pada kesadaran masyarakat,” (KR, hal. 1)

“Gubernur DIY menyatakan, soal kesiapan pemerintah dalam penerapan kenormalan baru akan bisa dilakukan dengan baik apabila diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat.” (KR, hal. 7)

“Hal lain yang menjadi prioritas untuk digalakkan menurut Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 adalah pentingnya kesadaran dan peran masyarakat sebagai subjek pencegahan penyebaran virus Korona.” (KR, hal. 7)

Teks berita ini berusaha menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan kesadaran dari masyarakat sebagai bentuk kerja sama pemerintah-masyarakat agar dapat tercapai ‘new normal’.

“Paku Alam X menegaskan sinergitas dan gotong-royong sebagai tradisi khas DIY akan makin ditingkatkan, karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.” (KR, hal. 7)

Dalam teks berita ini, ‘new normal’ disajikan dalam sebuah kerangka ‘persiapan pemerintah dan kesadaran masyarakat’. Normal baru adalah sesuatu yang harus disongsong kedatangannya, bagaimana mekanisme persiapan, tahapan-tahapannya, serta apa yang sudah dilakukan pemerintah DIY selama pandemi selama ini adalah sinyal untuk mendorong pembaca untuk berpikir bahwa persiapan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat.

Relasi Dalam Teks

Aktor/partisipan berita: Gubernur DIY (Sri Sultan Hamengku Buwono X); Wakil Gubernur (Wagub) DIY (Pakualaman X); Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY (Pakualaman X)

Teks berita ini menunjukkan bagaimana penulis lebih cenderung sebagai saluran penghubung informasi dari pemerintah kepada pembaca. Penulis

menyampaikan segala yang sudah dilakukan pemerintah dan sekaligus persiapannya menyongsong normal baru.

“Lewat program netizen bertanya Pemda DIY Menjawab tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran tentang apa yang sudah dilakukan oleh tim gugus tugas DIY dalam penanganan Covid-19.” (KR, hal. 7)

“Raja Kraton Yogyakarta menambahkan, saat ini pemerintah telah menyiapkan beberapa protokol untuk kesiapan tatanan kenormalan.” (KR, hal. 7)

“Lebih lanjut, Wagub DIY tersebut mengatakan dalam menggalang kesiapsiagaan melawan Covid-19, kelurahan menjadi basis pertahanan yang diperkuat oleh pilar-pilar ketahanan tingkat dusun.” (KR, hal. 7)

Relasi aktor dalam berita

Teks berita ini menitikberatkan pada peran serta dan kesadaran masyarakat, maka dalam hal ini masyarakat menjadi salah satu elemen pendukung pemerintah dalam rangka tercapainya normal baru.

“Sultan mengajak agar masyarakat belajar hidup dengan ‘tepo sliro’, saling menghargai satu sama lain, saling menjaga satu sama lain.” (KR, hal. 7)

Penggunaan kata ‘mengajak’ yang muncul beberapa kali menunjukkan pola komunikasi yang tidak atas-bawah, masyarakat diposisikan sebagai *partner* kerja pemerintah alih-alih sebagai objek perintah.

“Kami mengajak pamong desa serta pejabat desa memperkuat kemanunggalan dengan warganya dalam memerangi Covid-19, terang Paku Alam X.” (KR, hal. 7)

Identitas Berita

Penulis dalam teks ini diidentifikasi sebagai saluran pemerintah dalam menyampaikan situasi dan kondisi yang terjadi serta bagaimana pemerintah mempersiapkan normal baru. Pemerintah dalam hal ini diposisikan sebagai pihak

yang memberikan ajakan kepada sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam persiapan tersebut.

“Semua pihak harus dilibatkan secara aktif karena kita semua terkena dampak dari wabah ini mulai dari sektor pemerintahan, pendidikan, pariwisata, dan masyarakat. (KR, hal. 7)

“Akademisi, pengusaha dan UMKM, media massa, masyarakat, komunitas, asosiasi profesi pasti akan dilibatkan untuk mendapatkan masukan dalam penanganan virus Korona di DIY.” (KR, hal. 7)

Teks 2: Ruang Sosial [8 Mei 2020]

(Dr Sutaryono)

Representasi “masyarakat” Teks Berita

Teks opini yang ditulis oleh Dr Sutaryono ini secara umum adalah kritik yang disampaikan penulis sebagai anggota masyarakat. Sebagai awalan, penulis artikel menjelaskan tentang istilah *social distancing* dan *physical distancing* yang menurutnya adalah sama saja.

“Merujuk pada berbagai sumber, baik social distancing maupun physical distancing merupakan tindakan pembatasan segala bentuk kerumunan, menjaga jarak, menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk mengurangi penularan virus.” (KR, hal. 1)

Argumen yang disampaikan penulis pada intinya adalah baik menggunakan istilah *physical* maupun *social distancing*, asalkan tujuannya adalah menghindari terciptanya kerumunan orang, maka tak ada gunanya berdebat. Penjelasan berlanjut menuju ruang sosial, dimana ruang sosial adalah satu dari sekian bentuk ruang-ruang yang lain.

Ruang sosial meliputi ruang fisik dan ruang non-fisik (virtual) yang merupakan media interaksi sosial dan dibentuk oleh tindakan sosial baik secara individu maupun kolektif. Penjelasan ini kemudian menjadi pengantarnya menyampaikan apa yang terjadi dalam realita masyarakat. Penulis artikel mengatakan bahwa kondisi ruang sosial masyarakat saat ini berada dalam kondisi

rentan karena beberapa faktor. Ia mengaitkan penanganan Covid-19 dengan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, referensi informasi, dan juga perbedaan daya tangkap atas pesan edukatif perihal Covid-19, serta sentimen pribadi. Kelima faktor ini penulis sampaikan secara berurutan beserta dengan masing-masing contohnya.

“Pemahaman dan kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan... diterima sebagai hal yang rasional dan perlu dilakukan. Hal ini dijumpai pada komunitas masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik. Pada masyarakat lain dengan tingkat pendidikan yang beragam, situasinya jauh berbeda. Praktik-praktik lockdown kampung secara ketat adalah salah satu wujudnya.” (KR, hal. 7)

Penulis menempatkan tingkat pendidikan masyarakat sebagai faktor yang paling besar pengaruhnya. Ia membandingkan bagaimana masyarakat dengan tingkat pendidikan yang ‘baik’ dengan tingkat pendidikan yang ia sebut ‘beragam’ dalam penerimaan protokol kesehatan Covid-19. Penulis menonjolkan masyarakat kampung sebagai perwakilan masyarakat dengan tingkat pendidikan ‘beragam’.

“Pihak luar yang tidak dikenal keras memasuki kampung dengan alasan apapun. Ironisnya, pos-pos penjagaan digunakan sebagai tempat ngumpul-ngumpul yang justru kontraproduktif dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, seperti berkumpul tidak mengenakan masker.” (KR, hal. 7)

Faktor kedua adalah kondisi perekonomian masyarakat. Ia menyoroti ketimpangan dalam penerapan *stay at home* dan *work from home* yang hanya bisa diterapkan oleh mereka yang secara ekonomi berada di kelas menengah ke atas. Sementara itu, masyarakat dengan ekonomi kurang beruntung masih harus melakukan kerja-kerja harian untuk menyambung hidup. Lalu, artikel berlanjut pada pembahasan faktor ketiga dan keempat, yaitu referensi informasi dan daya tangkap masyarakat terhadap pesan dari pihak eksternal. Faktor inilah yang menurut penulis menjadi faktor penentu dalam menentukan bagaimana kebijakan dalam masyarakat dapat terbentuk.

“Ketidakkompakkan antar-berbagai pihak dalam mensikapi himbauan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadikan praksis kerberagamaan dan respons terhadap pemudik pun berbeda-beda. Penentuan kondisi kampung termasuk zona hijau, kuning atau bahkan

merah, juga berbeda antarpemuka agama dan tokoh masyarakat.” (KR, hal. 7)

Referensi informasi yang tidak sinkron dalam menentukan status suatu wilayah menjadi perhatian penulis artikel ini karena kekhawatiran terbesarnya adalah kecenderungan menyepelekan protokol kesehatan dan imbauan dari pemerintah.

Menuju pada faktor kelima adalah adanya kepentingan dan sentimen pribadi. Penulis teks berita melihat kepentingan dan sentimen pribadi sebagai musuh yang tak disadari. Ia menggunakan kata ‘menyelinap’ untuk merepresentasikan sesuatu yang masuk secara sembunyi-sembunyi dan mempengaruhi pengambilan keputusan tokoh masyarakat dan relawan di lapangan.

Teks berita kemudian ditutup dengan resiko dan saran penulis berupa evaluasi yang ditujukan pada masyarakat maupun pemerintah dalam menyikapi problem-problem yang ada.

“Kegagalan mengelola berbagai faktor di atas dapat menimbulkan permasalahan baru yang justru bisa berdampak panjang pascapandemi Covid-19. Karenanya, evaluasi terhadap praksis penanganan dan penanggulangan Covid-19 di masyarakat perlu dilakukan secara serius. Baik oleh anggota masyarakat yang terlibat maupun institusi pemerintah...” (KR, hal. 7)

Relasi Dalam Teks

Relasi penulis-audience

Penulis artikel ini mengajak pembaca untuk memahami ulang tentang istilah *physical/social distancing*, mengetahui tentang realita yang terjadi tentang pelaksanaan protokol kesehatan, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan memberitahukan resiko, serta memberikan masukan kepada kedua pihak (masyarakat dan pemerintah).

*“Pada masa pandemi Covid-19, kita disuguhi perdebatan penggunaan istilah *social distancing* dan *physical distancing*. Mengapa? Karena*

kedua istilah tersebut seolah-olah mempunyai orientasi yang berbeda...” (KR, hal. 1)

Penulis menggunakan kata ganti ‘kita’ untuk memposisikan dirinya di pihak yang sama dengan pembaca sekaligus sebagai pengamat kondisi masyarakat. Penjelasannya tentang salah kaprah perihal penggunaan istilah baru, ia sedang “meluruskan” perdebatan istilah *physical distancing* dan *social distancing* yang terjadi.

“Ruang sosial, menurut Levebre (1991) merupakan salah satu bentuk ruang di samping ruang fisik dan ruang mental... ruang sosial adalah ruang fisik dan non fisik (virtual) yang merupakan media interaksi sosial dan dibentuk oleh tindakan sosial baik bersifat individual maupun kolektif.” (KR, hal. 1)

Berangkat dari penjelasan ini, penulis teks membuka tabir permasalahan dalam ruang sosial. Ia menjadi ‘peniup peluit’ tanda adanya permasalahan dalam penanganan Covid-19.

Relasi aktor dalam berita

Dengan memposisikan penulis sebagai pengamat, ia mengukuhkan dirinya berhak untuk bersuara kepada masyarakat bahwa ada potensi ‘disharmoni’ sosial bila problem-problem yang ada tidak segera diselesaikan dan dikelola dengan baik.

“Karenanya, evaluasi terhadap berbagai praksis penanganan dan penanggulangan Covid-19 di masyarakat perlu dilakukan secara serius. Baik oleh anggota masyarakat yang terlibat maupun institusi pemerintah... Jangan sampai modal sosial dan kegotongroyongan dalam penanggulangan Covid-19... berubah menjadi gejala-gejala disharmoni sosial yang kontraproduktif.” (KR, hal. 7)

Dengan menjadi pengamat, ia bisa sekaligus mengajak masyarakat dan pemerintah untuk mewaspadaikan ancaman-ancaman yang membayangi.

Identitas Teks Berita

Penulis dan pembaca dalam artikel ini diidentifikasi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sebagai orang yang mengamati respons sosial atas penanganan Covid-19, ia menemukan beberapa persoalan. Narasi yang dibawa

penulis adalah mengajak pembaca untuk menyadari persoalannya dan melakukan evaluasi secara serius.

Selain itu, identitas yang ditunjukkan dalam teks ini adalah adanya masyarakat yang dikategorikan menurut tingkat pendidikan oleh penulis artikel ini. Dengan mengidentifikasi warga menurut tingkat pendidikannya, penulis teks sedang menunjukkan perbedaan respon tiap masyarakat atas upaya penanganan Covid-19.

Teks 3: Penyerahan BST di Kulonprogo Warga Antusias, Abaikan ‘Jaga Jarak’ [10 Mei 2020, hal. 1]

(Rul)-z

Representasi “masyarakat” Dalam Teks

Teks berita ini menunjukkan bagaimana kondisi penyerahan bantuan sosial tunai (BST) yang berlangsung di Kulonprogo. Mekanisme pembagian, jumlah penerima bantuan dan besarnya juga diberitakan. Pembagian BST dilakukan oleh PT Pos Cabang Wates dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo. Mekanisme pembagian bantuan dilakukan melalui dua metode, yaitu layanan Pos Indonesia dan transfer bank (BNI, BRI, BTPN). Untuk Kulonprogo, ada 20.158 keluarga penerima manfaat (KPM), 17.643 di antaranya disalurkan melalui Pos Indonesia, sedangkan sisanya melalui transfer bank. Sedang besaran bantuan yang diserahkan adalah bantuan tunai sebesar Rp 600.000.

Berita ini mengekspose acara penyerahan simbolis bantuan oleh Bupati Kulonprogo yang dilaksanakan pada Sabtu, 9 Mei 2020 di Gedung Kesenian Wates. Bantuan dari Kementerian Sosial RI tersebut akan diterima oleh 1.200 penerima dari 6 kelurahan di Kapanewon Wates. Secara garis besar, teks berita ini mengatakan bahwa walaupun penyerahan BST sudah diatur sedemikian rupa, namun akhirnya berjalan dengan semrawut juga.

Ada dua hal yang menjadi sebab semrawutnya penyerahan BST, pertama adalah antusiasme warga, yang menyebabkan mekanisme jaga jarak menjadi tidak dihiraukan. Kedua adalah warga/keluarga penerima manfaat (KPM) yang terburu-buru menerima bantuan karena takut tidak mendapat bantuan. Teks berita ini memberikan penekanan pada penjadwalan yang tidak dipatuhi warga.

“Sebenarnya sudah kami jadwal dan jamnya sudah diatur. Tetapi warga datang bersamaan, sehingga terjadi kerumunan.”

“...sebenarnya untuk undangan sudah terbagi dalam jam-jam tertentu, tetapi tidak dihiraukan oleh KPM, karena mungkin keburu untuk menerima bantuan, akhirnya terjadi kerumunan.”

Selain dua faktor tersebut, kurangnya koordinasi dengan kepolisian setempat juga menambah kesemrawutan yang terjadi. Dari teks berita ini, dapat disimpulkan bahwa jaga jarak (*social distancing*) yang menjadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tak diatur dengan matang oleh penyelenggara dan tidak patuhi dengan baik oleh warga.

Relasi dalam Teks

Relasi penulis-pembaca

Penulis artikel ini memposisikan diri sebagai pihak yang menjelaskan apa yang terjadi ketika proses pembagian BST di Kulonprogo kepada pembaca. Mengajak pembaca mengetahui bahwa pembagian BST tersebut berjalan dengan tidak semestinya, yaitu berdesak-desakan, tidak mematuhi aturan jaga jarak, dan datang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penulis tidak sedang berdialog dengan pembaca, melainkan sedang memposisikan dirinya sebagai pembawa kabar kepada pembaca.

“Proses pembagian BST bagi warga kurang mampu yang terdampak pandemi virus Korona tersebut diwarnai desak-desakan sehingga mengabaikan social distancing.”

Selain memberitakan bahwa jaga jarak tidak dipatuhi dengan baik, penulis juga mengungkapkan tidak matangnya persiapan yang dilakukan dengan

membeberkan bahwa tidak ada rapat koordinasi dengan kepolisian setempat terkait dengan acara pembagian BST yang dilaksanakan.

“Kapolsek Wates Kompol Endang Suprpto mengatakan pihaknya hanya diminta mengamankan selama proses pencairan BST dan belum pernah ada rapat koordinasi.”

Relasi aktor dalam berita

Posisi penulis sebagai pembawa kabar membawa pengaruh pada bagaimana aktor dalam berita berinteraksi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat pada bagaimana penulis menentukan narasumber berita. Selain menyajikan perspektif dari penyelenggara pembagian BST, ia juga menyajikan perspektif peserta kegiatan dengan memasukkan warga sebagai narasumber.

“Salah satu KPM, Eka Desi Setyawati (28) menyayangkan penyaluran BST yang semrawut itu. Menurut Eka, penyaluran BST tersebut akan lebih baik jika dilangsungkan di masing-masing kalurahan guna meminimalisir adanya kerumunan.”

Argumen Desi yang dimunculkan setelah perspektif dari penyelenggara (pemerintah dan dinas terkait) seolah menjadi kritik dan masukan bagi penyelenggara. Selain itu juga menjadi tanda hadirnya perspektif warga dalam berita ini. Relasi aktor dalam berita adalah setara karena masing-masing aktor mampu memberikan penilaian satu sama lain atas kejadian dalam berita.

Selain Desi, pihak penegak hukum pun juga disajikan dalam berita ini. Pihak kepolisian mengatakan bahwa tidak ada rapat koordinasi terkait atas diadakannya pembagian BST tersebut.

“Sebagai upaya penerapan protap kesehatan, petugas terus mengingatkan warga untuk mencuci tangan dengan sabun dan tertib menjaga jarak.”

Tidak adanya rapat koordinasi membuat pihak kepolisian tidak mempersiapkan langkah preventif. Meski begitu, petugas tetap fokus pada imbauan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dan menjaga jarak.

Identitas Teks Berita

Teks berita ini mengidentifikasi warga sebagai pihak yang sulit diatur. Antusiasme dan ketakutan warga ‘ditunjuk’ menjadi sebab kesemrawutan pembagian BST terjadi. Menekankan bahwa warga harus selalu diatur dan diingatkan agar bisa patuh pada mekanisme *social distancing*/jaga jarak.

“Karena ingin segera cair, warga berdesak-desakan dan kami terus mengingatkan agar mereka jaga jarak.”

Penulis berita mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang berada di tengah, yaitu pihak yang mempertemukan dua perspektif yang berseberangan.

Mekanisme *social distancing* adalah sesuatu yang sulit ditaati dalam kondisi masyarakat yang tidak patuh dan dilanda ketakutan. Di sisi lain, kontribusi penyelenggara dalam penegakan *social distancing* pun masih belum sepenuhnya efektif.

Teks 4: Jakarta Siapkan Penegakan Hukum DIY Lakukan Prosedur PSBB

(08 April 2020, hal. 1)

(Edi/Ira/Ria)-d

Representasi “masyarakat” Teks Berita

Jakarta telah mendapat kewenangan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari Menkes, implikasinya, pemerintah DKI dapat menindaklanjutinya dengan penegakan hukum. Sementara itu, PSBB secara prosedur sudah dilaksanakan di DIY, namun belum diperkuat secara administratif. Sejauh ini, Gubernur DIY mengacu pada undang-undang penanggulangan bencana dalam penerapan prosedur PSBB, bukan pada peraturan Menteri Kesehatan.

Perhatian Sri Sultan HB X dalam teks berita ini ada pada jumlah pemudik yang belum sampai pada puncaknya, mengingat bahwa di DIY sendiri, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sudah mencapai 2.880 orang. Oleh karena itu fokus gubernur adalah mengkonsolidasikan kebijakan dengan gubernur-gubernur di Jawa dalam rangka pembatasan pemudik.

“Apabila kita tidak tahu kapan puncak pemudik datang ke daerah, kita akan kesulitan untuk memprediksi. Jadi kesepakatannya hanya itu, bagaimana kita mencoba mencari cara dan mengambil kebijakan seperti mempersulit pemudik berbondong-bondong kembali ke daerah” (KR, hal. 7)

Teks berita ini, secara garis besar sedang menunjukkan bahwa kesulitan dalam pembatasan jumlah pemudik adalah karena adanya perbedaan dalam penerapan PSBB di wilayah-wilayah tertentu.

“Sebab di satu sisi tidak mungkin melarang pemudik, di sisi lain kalau mereka bisa diminimalisasi tim dibantu dengan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta agar bisa membatasi pemudik.” (KR, hal. 7)

Sultan mencoba membujuk Pemprov DKI untuk membuat kebijakan yang mendukung usaha mempersulit pemudik datang ke DIY. Teks berita ini merepresentasikan bahwa dalam rangka menekan jumlah pemudik, PSBB adalah sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan secara terpisah per daerah, namun harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Relasi dalam Teks

Aktor/partisipan berita: Gubernur DKI Jakarta [Anies Baswedan]; Gubernur DIY [Sri Sultan Hamengku Buwono X]; Plt Menteri Perhubungan [Luhut Binsar Panjaitan]; Kepala Dinas Perhubungan DIY [Tavip Agus Rayanto]; wartawan; warga Yogyakarta; pemudik.

Relasi penulis-pembaca

Penulis teks berita ini membangun relasi dengan pembaca sebagai pembawa kabar. Dengan menunjukkan dimana letak perhatian Sri Sultan, penulis sedang berusaha menyamakan visi pembaca dengan gubernur.

“Kami ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat sehingga tidak berdampak signifikan terhadap aspek perekonomian.” (KR, hal. 7)

Penulis dan pembaca bukan sebagai orang yang sedang berbicara satu sama lain, melainkan pembaca menerima informasi dari penulis berita. Narasinya adalah kekhawatiran Sri Sultan terhadap lonjakan jumlah pemudik dan fokusnya pada aspek perekonomian.

Relasi aktor dalam berita

Aktor-aktor dalam berita adalah para pemangku kebijakan yang sedang berinteraksi dengan warga, pemudik, dan wartawan. Mereka menyampaikan bagaimana kesulitan dalam membatasi pemudik bila PSBB dilakukan dengan skema yang sekarang. Warga Yogyakarta adalah pihak yang sudah melaksanakan PSBB, sementara pemudik adalah pihak yang hendak dibatasi mobilitasnya.

“Gubernur DIY dalam wawancara di sejumlah media televisi secara langsung mengatakan, sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan rencana PSBB, warga di Yogyakarta sudah melakukan hal serupa.” (KR, hal. 7)

“Pemda DIY tengah berupaya untuk membatasi lonjakan pemudik ke DIY agar tidak memicu ledakan kasus virus Korona di DIY ke depannya. Untuk itu, Pemda DIY masih melakukan konsolidasi kebijakan-kebijakan terkait pembatasan pemudik dengan Gubernur-gubernur di Jawa.” (KR, hal. 7)

Identitas Teks Berita

Teks berita ini menempatkan PSBB sebagai sebuah sistem yang harus diperbaiki lagi skema dan pelaksanaannya. Adanya perbedaan dalam pelaksanaan PSBB menyebabkan sulitnya menekan jumlah pemudik. Bila suatu wilayah sudah memperoleh kewenangan untuk melaksanakan PSBB sementara wilayah lain belum, maka berarti bahwa puncak kedatangan pemudik akan menjadi potensi lonjakan kasus Covid-19 bagi daerah-daerah tujuan mudik.

“Sultan HB X mengatakan agar jumlah pemudik yang saat ini 30 persen tersebut agar tidak bertambah.” (KR, hal. 7)

Teks 5: Sultan: Bukan Berarti Bisa Bebas 60 Persen Warga DIY Setuju ‘New Normal’ [Sabtu, 30 Mei 2020, hal. 1]

(Dev/Ira/Ria)-d

Representasi “masyarakat” Teks Berita

Teks berita ini secara umum terdiri atas pertama, laporan hasil survey yang dilakukan oleh Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan

(MDKIK) UGM tentang persepsi masyarakat DIY terkait upaya pencegahan penularan Covid-19. Survey ini kemudian ditanggapi dengan mengamati kelemahan dan kelebihan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Bagian kedua adalah imbauan Gubernur DIY Sri Sultan HB X bahwa penerapan 'New Normal' bukan berarti bahwa masyarakat lepas dari kewajiban melaksanakan protokol kesehatan. Lalu, bagian ketiga adalah pembahasan tentang lomba untuk pencerminan 'New Normal' bagi daerah-daerah.

Survey diadakan pada 26-28 Mei 2020 dengan responden sebanyak 492 orang yang tersebar di lima kabupaten/kota se-DIY. Tujuan dari survey ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat DIY terkait wacana DIY sebagai daerah percontohan penerapan new normal.

Hasil survey tersebut menyatakan bahwa sebanyak 60 persen setuju pemberlakuan 'New Normal' berupa pembukaan kembali pasar, pertokoan, mall, dan tempat ibadah. Kemudian, 61,8 persen responden setuju penerapan protokol kesehatan, sedang 28,5 persen tidak setuju, sisanya setuju namun dengan protokol biasa. Sebanyak 72,8 persen menginginkan tempat ibadah dibuka. Lalu, 65 persen menginginkan kegiatan pendidikan dibuka kembali. Untuk pembukaan mall dan pasar, sebanyak 74,6 persen setuju. Tanggapan atas hasil survey tersebut adalah sebagai berikut:

“Artinya yang mengisi kuisisioner adalah mereka yang sudah melek teknologi atau akrab dengan dunia online sementara belum terwakili warga yang berkerumun di pasar.” (KR, hal. 7)

“Meski begitu, menurut Muhadjir Darwin, survey ini layak juga untuk dipertimbangkan oleh pengambil kebijakam. Sementara di tingkat bawah, masih banyak warga yang tidak disiplin menaati protokol kesehatan standar Covid-19, seperti memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.” (KR, hal. 7)

Hasil survey tersebut dilihat dari dua perspektif, di satu sisi ia belum mampu mencakup warga secara keseluruhan. Perbedaan akses pada teknologi membuat survey yang menggunakan instrumen suvey *online* dinilai tidak representatif.

Namun di sisi lain, hasil survey ini dianggap sudah layak untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan.

Bagian kedua adalah Sri Sultan menjelaskan bagaimana sesungguhnya ‘new normal’ bukanlah serta merta bebas, melainkan bebas dengan syarat bahwa kerumunan dapat diminimalisir di tempat-tempat yang rawan.

“Karena pemantauan dan pengawasan akan terus dilakukan. Misalnya hotel dan restoran dipastikan bisa mengontrol penyebaran Covid-19 di areanya. Mulai dari mengkondisikan untuk pengunjung bisa jaga jarak, melengkapi fasilitas cuci tangan, pembersihan berkala untuk fasilitas yang banyak dipegang orang, dan seterusnya.” (KR, hal. 7)

Dari kutipan di atas dapat dilihat bagaimana prioritas pada pengkondisian jaga jarak, fasilitas cuci tangan, dan pembersihan rutin ditunjukkan sebagai bentuk kehati-hatian Sultan dalam penerapan new normal. Lalu teks diteruskan dengan kutipan berikut:

“Harapan kita kan kasusnya negatif semua jangan ada yang positif dalam arti yang PDP dan sebagainya. Kalau itu sudah memungkinkan turun dan diyakini tidak fluktuatif, baru kita bisa diberlakukan ‘New Normal’.” (KR, hal. 7)

Bagian ketiga dari teks ini adalah pembahasan lomba penerapan new normal di daerah-daerah. Disebutkan bahwa lomba inovasi yang diadakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Balitbang Kemendagri) ini akan mempunyai 7 item yang dilombakan, di antaranya adalah inovasi di pusat perbelanjaan, inovasi transportasi publik, inovasi sektor pariwisata dan sebagainya. Dengan output berupa video berdurasi 2 menit, peserta (pemda-pemda) akan dinilai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan kementerian terkait lainnya.

Relasi Teks Berita

Relasi Penulis-Audience

Penulis membangun relasi dengan pembaca sebagai peneliti. Ia menyampaikan perspektif masyarakat terkait rencana ‘normal baru’ dengan menggunakan data hasil survey, membuatnya terlihat lebih ilmiah. Lebih jauh,

penulis menampilkan kelebihan dan kelemahan hasil survey tersebut, membiarkan pembaca mengetahui ‘dua sisi’ secara lebih utuh.

Terkait *physical distancing*, penulis merelasikannya dengan ‘protokol kesehatan’ dan persiapan diterapkannya ‘new normal’ di DIY, dimana ia menjadi salah satu indikator untuk tempat umum boleh beroperasi atau tidak.

“Mulai dari mengkondisikan untuk pengunjung bisa menjaga jarak, melengkapi fasilitas cuci tangan, pembersihan berkala untuk fasilitas yang banyak dipegang orang, dan seterusnya. Kalau nggak sanggup seperti itu, dikhawatirkan jadi persoalan baru,” (KR, hal. 7)

Meski begitu, alih-alih membicarakan sanksi atas pelanggaran atau ketidakmampuan menjalankan protokol, teks berita tersebut malah melempar pernyataan terkait ‘kekhawatiran akan persoalan baru’ yang tak ada kaitannya dengan sanksi. Mengindikasikan bahwa ‘new normal’ belum selesai dibahas secara menyeluruh, atau kemungkinan lain adalah ia memang tidak didesain untuk menjadi aturan baku yang terikat hukum.

Relasi Aktor dalam Berita

Aktor-aktor dalam berita ini dibangun dalam relasi yang berimbang. Semua pihak yang terkait atau merasakan imbas dari penerapan ‘new normal’ dimunculkan di seujur teks berita, yaitu warga (dalam bentuk hasil survey), akademisi, dan pemerintah.

“Tentunya sebelum memutuskan untuk memberlakukan ‘New Normal’ harus dilihat terlebih dahulu perkembangan kasus Covid-19 di DIY, apakah sudah melandai atau belum. Pasalnya ketika DIY sudah memasuki era new normal, ada banyak hal yang perlu diperhatikan.”

Meski begitu, kecenderungan untuk memberikan porsi lebih banyak pada pemerintah masih terlihat pada teks berita ini.

Identitas Teks Berita

‘New Normal’ diidentifikasi menjadi sesuatu yang bisa diterapkan sesuai situasi dan kondisi tertentu. Persepsi warga menjadi salah satu situasi kondisi yang

dimaksud. Identitas warga dibangun menjadi data-data statistik untuk mengukur persepsi warga DIY.

Hasil survey yang disajikan dalam teks berita ini mengidentifikasi kecenderungan yang pro terhadap penerapan 'new normal'. Selain hasil survey, kecenderungan tersebut juga terlihat pada porsi yang diberikan untuk rencana lomba inovasi yang merangkap sebagai sarana sosialisasi terkait 'new normal'.

Interpretasi Analisis Teks

Bagian ini adalah penjabar yang akan memaparkan secara lebih mendalam analisis teks berita yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam teks berita 1.1, misalnya, 'normal baru' disajikan sebagai serangkaian aktivitas yang idealnya bersifat kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat. Ia bukan sesuatu yang ditanggung oleh pemerintah sendiri, namun perlu dukungan dari masyarakat sebagai *partner*. Dengan kata lain, menuntut partisipasi masyarakat sebagai salah satu mata rantai yang penting dalam langkah-langkah yang diambil pemerintah. Bentuk partisipasinya boleh dibilang tak muluk-muluk, masyarakat hanya disuruh untuk sadar.

Relasi yang terbangun antara pemerintah dengan masyarakat dapat dilihat melalui komposisi kutipan-kutipan dalam teks berita. Teks berita 1.1 yang mengutip perkataan Gubernur DIY dan wakil gubernur DIY yang sekaligus juga adalah ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengindikasikan bahwa peran "menyadarkan" adalah tugasnya pemerintah, dengan dibantu media massa yang ada, KR adalah salah satunya.

Narasi 'ketaksadaran' dilandasi oleh asumsi bahwa masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Maka pendekatan yang dilakukan adalah memberikan informasi dengan harapan akan sadar setelah diberitahu.

Bila mengamati opini pada berita 1.2 dengan sedikit lebih teliti, berikut adalah “problem-problem” dalam penanganan Covid-19: *Pertama*, tingkat pendidikan. *Kedua*, kondisi ekonomi masyarakat. *Ketiga*, referensi informasi. *Keempat*, perbedaan daya tangkap atas pesan edukatif. *Kelima*, sentimen pribadi. Dari kelima poin ini, jelas bahwa objek kritiknya adalah masyarakat umum. Sekali lagi, warga menjadi pihak yang salah langkah. Kolom “Analisis KR” memang menerima tulisan yang analitis dan kuat data. Namun, pemilihan artikel 1.2 menandakan bahwa KR memang mengambil peran sebagai “pengingat” warga.

“Ruang sosial, menurut Levebre (1991) merupakan salah satu bentuk ruang di samping ruang fisik dan ruang mental... ruang sosial adalah ruang fisik dan non fisik (virtual) yang merupakan media interaksi sosial dan dibentuk oleh tindakan sosial baik bersifat individual maupun kolektif.”

Meski bertujuan untuk menyampaikan kritik kepada anggota masyarakat, namun fungsi informatif dan mendidik tetap berusaha dipegang KR dengan mengawali teks dengan meluruskan perdebatan pendefinisian *physical distancing* dan *social distancing*, serta penjelasan singkat tentang ruang sosial. Dalam opini ini, sebagian besar poin memang ditujukan kepada anggota masyarakat, namun tawaran solusi yang diajukan menyasar semua pihak (pemerintah dan masyarakat).

Ada yang agak lain pada teks berita 1.3. Bila teks-teks sebelumnya menemukan dan menunjukkan “kesalahan” warga dengan terang-terangan, teks berita ini boleh dibilang agak lumayan *fair*. Kritik pada warga tetap muncul di awal dan berkali-kali menyebutkan bahwa warga sesungguhnya tak patuh pada instruksi dan datang tak sesuai jadwal yang ditentukan. Bedanya, selain mengutip penyelenggara kegiatan, peserta pembagian BST diberi sedikit ruang untuk tampil dalam pemberitaannya. Perspektif warga berhasil masuk dalam medan wacana dan ikut berkompetisi di dalamnya.

“Salah satu KPM, Eka Desi Setyawati (28) menyayangkan penyaluran BST yang semrawut itu. Menurut Eka, penyaluran BST tersebut akan lebih baik jika dilangsungkan di masing-masing kalurahan guna meminimalisir adanya kerumunan.”

Walaupun porsinya tidak sebanyak penyelenggara acara, kepala dinas, dan kepala daerah, namun setidaknya, peserta yang menjadi narasumber berita ini telah “cukup” memperlihatkan dua sisi yang berlainan dalam satu peristiwa.

Berita 1.4 memperlihatkan bagaimana sesungguhnya tak sinkronnya pemerintah pusat dengan daerah terkait prosedur pelaksanaan PSBB. Berita 1.4 mengekspose perhatian Sri Sultan terhadap kesulitan yang akan muncul menjelang arus mudik bila PSBB antar daerah tak sinkron. Dilemanya, menurut Sultan adalah tidak mungkin melarang pemudik di satu sisi, sementara di sisi lain akan sangat sulit untuk membatasi pemudik bila tidak dibantu dengan kebijakan yang mempersulit mudik.

Tak sinkron yang dimaksud adalah adanya perbedaan landasan hukum yang digunakan antara Jakarta dan Yogyakarta dalam pelaksanaan PSBB. Bila Jakarta telah mendapat kewenangan untuk menerapkan PSBB dari Menteri Kesehatan, Yogyakarta masih mengacu pada UU penanggulangan bencana.

Sri Sultan, dalam berita ini hendak mengkonsolidasikan kebijakan dengan pemda-pemda sepulau Jawa. Uniknya, berita 1.4 tidak secara agresif menyentuh warga, melainkan lebih fokus pada riuhnya benturan kebijakan di tingkat pimpinan daerah. Posisi KR dalam berita ini cukup jelas berpihak pada Sultan dengan menyajikan masalah ini dari sudut pandang gubernur DIY. Hal ini diperkuat pula dari kutipan yang diambil tentang aspek ekonomi.

Sudut pandang demikian dapat ditemukan pula pada berita 1.5 dimana teks menampilkan hasil survey yang dilakukan secara daring dan dimaksudkan untuk mengetahui persepsi warga Yogyakarta terkait Normal Baru. Yang tidak KR katakan adalah warga nampaknya berusaha dibuat percaya bahwa New Normal adalah langkah yang tepat untuk segera dilaksanakan. Menonjolkan hasil survey yang menyatakan bahwa mayoritas sepakat dengan dilaksanakannya New Normal dengan sembari memberlakukan protokol kesehatan.

2. Analisis Meso

a. Produksi Teks

Praktik kewacanaan yang diteliti selanjutnya adalah proses produksi teks yang dilakukan oleh KR. Proses produksi teks ini akan dilihat dari aspek redaksional institusi pers dan aspek situasionalnya. Analisis proses produksi ini dilakukan untuk melihat apa yang melatarbelakangi teks-teks tersebut.

Menurut dari hasil wawancara dengan pemimpin redaksi KR, Octo Lampito, harian Kedaulatan Rakyat secara organisasi tidak jauh beda dengan koran-koran lain pada umumnya. Ia terdiri dari pemimpin redaksi di tingkat teratas, kemudian memiliki wakil pemimpin redaksi yang membawahi redaktur pelaksana, kemudian di bawahnya ada redaktur, dan reporter.

Produksi teks berita diawali dengan rapat redaksi. Rapat redaksi dilangsungkan dengan menyesuaikan desain liputan oleh redaktur. Dalam rapat tersebut, ditentukanlah capaian-capaian yang harus terpenuhi dalam berita, di dalamnya termasuk juga pembahasan tentang topik berita apa yang hendak diliput, siapa (jurnalis) yang akan melakukan liputan, arah pemberitaan, serta narasumber berita. Walaupun di dalam rapat tersebut usulan-usulan topik disampaikan dan didiskusikan, namun jurnalis di sisi lain juga memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri topik pemberitaan.

Setelah topik disepakati, jurnalis atau reporter akan mencari bahan-bahan liputan sesuai dengan hasil rapat. Karena sifat koran yang terbit setiap hari, jurnalis KR tersebar dan ditempatkan di banyak lokasi untuk mempermudah mobilitas serta menghemat waktu di lapangan mengingat tenggat waktu yang singkat dalam penulisan berita. Untuk melengkapi kecakapan mereka, diklat dan pelatihan didapat jurnalis KR, di antaranya adalah pelatihan peningkatan *skill* seperti menulis berita, cara mewawancarai, etika, kode etik jurnalistik, dan juga *code of conduct* koran KR. Pemilihan narasumber ditentukan dengan pertimbangan kepakaran, keterlibatan pada peristiwa, dan saksi.

Selepas proses penulisan selesai, redaktur kemudian memiliki kewenangan untuk melakukan revisi sampai dirasa sesuai dengan desain liputan yang telah disepakati sebelumnya.

KR memiliki wadah menyampaikan pendapat bagi pembacanya dalam kolom “Analisis KR” dan “Opini”. Setiap orang dapat mengirim artikel dengan tema apapun untuk kolom “Analisis KR” namun kolom ini lebih mengutamakan artikel yang aktual ketimbang *timeless*. Kriteria artikel untuk kolom Analisis pun juga diharuskan cukup data dan bersifat analitis. Tidak hanya dapat menerima, KR juga dapat meminta secara khusus kepada pakar tertentu untuk mengirimkan artikel sesuai dengan bidang keahlian dan isu-isu terkini.

b. Proses Pewacanaan

“...KR tetaplah koran sebagaimana media massa umumnya yang menjadi alat informasi, mendidik, dan menghibur pembacanya. Hanya saja, semua dilakukan dengan ramuan khas yang tak meledak-ledak.”
(Iswari, 2007)

Kutipan di atas diambil dari tulisan Iswari (2007) dalam *Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007)* yang tampak seperti pernyataan akan kekhasan koran KR.

Dalam beberapa kesempatan, seringkali jurnalis harus mencari tahu terlebih dahulu istilah maupun konsep yang relatif asing bagi masyarakat. Oleh karenanya, dalam tugasnya sebagai pembawa kabar dan sarana pembentukan opini publik, mereka haruslah mampu membawakan konsep dan istilah tersebut dengan wacana yang tepat agar dapat dijangkau oleh pemahaman masyarakat, yang dalam konteks ini adalah bagaimana *physical distancing* diwacanakan untuk khalayak pembaca KR.

“Yaa, kita kan udah baca, yo sudah tahu yo semuanya, jadi itu sudah menjadi kewajiban kita ketika terjadi sesuatu ya kita harus tahu bahannya... dari media, macem-macem, dari media cetak, media online. Statement menteri juga bisa.”

Pewacanaan *social distancing* terkait dengan bagaimana ia didefinisikan, yang kemudian akan direpresentasikan dalam teks. KR tidak secara mandiri

mendefinisikan *social distancing*, melainkan merujuk pada media-media lain (cetak maupun *online*), dan juga pernyataan menteri.

Dalam hal pemilihan tema Covid-19 dan *physical distancing*, Octo Lampito menerangkan bahwa salah satu hal yang melandasi pemilihan topik-topik tersebut adalah karena adanya keinginan untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk sadar akan kondisi pandemi ini dan patuh pada protokol kesehatan yang berlaku.

“Karena pada situasi semacam ini, kami memilih topik itu untuk memperbaiki supaya mereka taat protokol kesehatan”

Ada semacam dorongan moral jurnalis untuk “memperbaiki” dan “menyadarkan” sehingga topik ini dipilih. Hasilnya, perhatian KR tercurah pada perilaku masyarakat dalam kondisi pandemi yang harus disadarkan.

“...kan publik ini kan kadang-kadang ngawur ya, makanya beberapa kali sultan kan mengingatkan kesadaran. Artinya bahwa, sadar bahwa sekarang situasinya masih pandemi.”

Secara umum, pemberitaan KR didesain dengan perspektif yang menempatkan publik sebagai pihak yang menurut saja dengan wacana yang dibawakan KR. Dengan kata lain, Dalam hal ini, publik dianggap sebagai seseorang yang belum sadar, seseorang yang belum bisa berjalan dan berpikir secara mandiri, bahkan disebut “ngawur”. Oleh karenanya, kecenderungan dalam arah pemberitaan adalah seruan-seruan untuk sadar.

3. Analisis Makro

Analisis dari 5 teks berita yang diambil peneliti menunjukkan, “masyarakat” direpresentasikan sebagai “warga yang lupa dan tak sadar”. Masyarakat, dalam kerangka PSBB, *social/physical distancing*, *new normal*, maupun istilah-istilah sejenis ditempatkan dalam posisi yang strategis. Posisi yang dimaksud adalah sebagai komponen utama dalam melaksanakan PSBB di samping pemerintah. Namun, kecenderungan yang muncul adalah narasi pelaksanaan PSBB beserta problematikanya dengan berbagai kritik yang ditujukan pada masyarakat dengan cukup agresif.

Komposisi narasumber berita menunjukkan betapa sedikitnya porsi representasi atas “masyarakat” dalam teks berita. Dari 5 berita dalam unit analisis, hanya satu yang cukup berhasil menampilkan masyarakat dan pendapatnya. Berbanding terbalik dengan porsi yang diberikan kepada pemangku kepentingan seperti pejabat, kepala daerah, ketua gugus tugas, dan akademisi.

Secara organisasional, Kedaulatan Rakyat tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan media massa yang lain. Ia memiliki pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, dan, reporter. Proses produksinya pun bisa dibilang cukup standar, ia diawali dengan rapat redaksi yang di dalamnya adalah pembahasan mengenai topik pemberitaan, tujuan, narasumber, dan reporter yang melaksanakan. Kemudian melakukan reportase, setelah itu proses penulisan berita, proses edit, hingga akhirnya sebuah berita dimuat.

Struktur koran KR memungkinkan publik untuk dapat menyampaikan pendapat melalui beberapa cara, beberapa di antaranya adalah melalui kolom “Analisis KR” dan “Opini”. Kedua kolom ini memiliki standar yang berbeda agar sebuah artikel dapat dianggap layak dan dimuat. Kolom Analisis KR lebih mengedepankan isu-isu yang aktual, cukup data, dan analitis sementara kolom Opini lebih menyenangkan isu-isu yang bersifat *timeless*.

Sebelum membicarakan posisi masyarakat, akan peneliti sampaikan dahulu bagaimana KR sebagai media massa memosisikan dirinya di tengah-tengah *audiencenya*, warga Yogyakarta.

Dilihat sisi kesejarahannya, telah disebutkan sebelumnya bahwa KR berdiri pada 1945, namun cikal bakal koran ini sebetulnya telah ada semenjak 1942 sebagai media propaganda Jepang dengan nama “Sinar Matahari” pimpinan R.M. Gondhojuwono. Fungsi media yang diprakarsai oleh Sendenbu atau Barisan Propagandis Jepang ini adalah menyebarluaskan program-program politik pemerintahan Dai Nippon dan menggalang dukungan kalangan bumiputra untuk Jepang. Namun, pada nyatanya, redaktur-redaktur Sinar Matahari waktu itu justru “menyalahgunakan” surat kabar ini untuk memberitakan peristiwa yang menguntungkan bangsa Indonesia.

Khawatir akan diambil alih kembali oleh Jepang, Sinar Matahari kemudian disegel oleh Komite Indonesia Pusat. Setelah penyegelan selama sebulan inilah, surat kabar ini kemudian hidup kembali pada 27 September 1945, tepatnya 40 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, sebagai “Kedaulatan Rakyat” dan menggunakan mesin-mesin peninggalan Sinar Matahari. Dalam sebuah artikel berjudul *Kedaulatan Rakyat, Koran Pertama setelah RI Merdeka dan Masih Eksis*, nama Kedaulatan Rakyat diambil dari penggalan teks Pembukaan UUD 1945 (Raditya, 2019). Namanya pun baru tercetus satu hari sebelumnya, dan diusulkan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo, Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Yogyakarta saat itu.

KR pernah berganti nama menjadi “Dwikora” pada 1966 karena masalah keamanan dan mempertahankan kenetralannya pasca tragedi Gerakan 30 September (G30S) 1965. “Dwikora”, selain dianggap sebagai nama yang lebih umum dan “aman” juga dipayungi langsung oleh Departemen Penerangan (Deppen) sesuai dengan aturan pemerintah yang mengharuskan media untuk bernaung di bawah suatu badan, yaitu pemerintah, partai, atau Golongan Karya. Karena di bawah Deppen, KR tidak mengalami pembredelan seperti banyak koran lain pada waktu itu.

Pada masa keributan '65-'66, KR tetap beroperasi dengan lancar. Bahkan, selama periode Mei-Desember 1966, KR pernah melakukan cetak kilat di sore hari untuk memberitakan Mahkamah Militer Luar Biasa dan penangkapan orang-orang PKI. Dalam cetak kilat tersebut, koran tidak diedarkan melainkan pembaca datang ke kantor redaksi untuk mendapatkannya.

Menurut penuturan Direktur Pemasaran KR, Fajar Kusumawardhani dalam *Kedaulatan Rakyat Saksi Jatuh Bangunnya Pemerintahan Indonesia*, KR bukannya tidak berani menurunkan berita yang keras, melainkan karena memang tidak sesuai dengan *lifestyle* KR dan masyarakat Jogja sendiri. Nama “Dwikora” hanya dipakai selama 59 edisi sebelum terbit kembali sebagai “Kedaulatan Rakyat” (Iswari, 2007).

Kekhasan jurnalisme KR dikemukakan Darmanto, seorang peneliti Badan Litbang SDM Kemen Kominfo Yogyakarta. Menurutnya, KR memiliki karakteristik tersendiri dalam pemberitaannya. Produk jurnalisme KR sangat khas Jawa dengan menyematkan banyak falsafah Jawa dalam pemberitaannya. Meskipun dianggap kurang greget dan lamban, namun menurutnya, di sisi lain, karakter yang demikian menunjukkan kehati-hatian, tidak *grusa-grusu*, penuh pertimbangan, reflektif, dan empatik. (Darmanto, 2017)

Untuk lebih memahami konteks pemberitaan KR, perlu dibicarakan pula keberadaannya sebagai media massa lokal beserta fungsi pewarisan budayanya. Dalam sebuah studi, disebutkan bahwa media massa lokal memiliki peluang untuk membawa dan nilai luhur budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan media massa lokal dapat dianggap sebagai banteng untuk melestarikan budaya. (Rachelita & Ispandriarno, 2014)

KR sendiri dikategorikan sebagai media massa lokal karena memenuhi beberapa kriteria berikut, yakni *pertama*, dikelola oleh organisasi yang berasal dari masyarakat setempat; *kedua*, mengacu dan menyesuaikan diri pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat; *ketiga*, mementingkan berita mengenai peristiwa, kegiatan, masalah, dan personalia masyarakat setempat; *keempat*, khalayak media massa lokal adalah masyarakat yang berada satu wilayah dengan pengelola media massa; dan *kelima*, khalayak media massa lokal terdiri dari masyarakat yang kurang bervariasi secara struktur dan strata sosial. (p. 6)

Masih dalam studi yang sama, fungsi-fungsi pewarisan budaya tampak melalui ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memperkuat kesepakatan nilai sosial dalam masyarakat lokal
2. Mengulas kehidupan masyarakat lokal
3. Mengulas kearifan masyarakat lokal
4. Membangkitkan identitas kultural
5. Terdapat proses pengambilan makna budaya

Dengan demikian, bagaimana KR memposisikan dirinya di tengah-tengah khalayaknya dapat dipahami dengan mencermati konteks kesejarahan, kelokalan, fungsinya sebagai pewaris nilai-nilai budaya. Hasil dari analisis teks dan wawancara menunjukkan bahwa KR mengambil peranan yang selaras dengan penguasa setempat, yaitu sebagai pengingat dan hendak memperbaiki perilaku masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Teks-teks jurnalistik yang diproduksi memiliki kecenderungan yang mewibawakan penguasa di satu sisi, dan membawa kesan “menyudutkan” warga di sisi lain.

Membicarakan Yogyakarta sebagai konteks sosiokultur dalam proses produksi teks tidak bisa dilepaskan dari dimensi kesejarahan yang panjang. Posisi masyarakat dalam konteks sosial-politik ruang Yogyakarta akan dibahas dalam bingkai wilayah dengan predikat “daerah istimewa” beserta segala kekhasan dan dinamikanya.

Studi oleh Robert Endi Jaweng (2013) menyebutkan bahwa sebelum menjadi daerah istimewa, Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinyatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Pakualaman VIII melalui Maklumat 5 September 1945. Demi memperkuat landasan hukum, disusun pula UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang praktis menjadi satu-satunya basis legal yang mendasari terbentuknya DIY.

Secara kronologis, keistimewaan daerah Yogyakarta dilegitimasi dan diimplementasi dengan berpedoman pada UU Nomor 3 Tahun 1950. Namun, UU ini disebut tidak jelas dalam menjelaskan esensi keistimewaan dan perbedaannya dengan daerah otonom biasa. Maka, sekian dekade kemudian dibentuklah UU Nomor 13 Tahun 2012 untuk memperjelas dan memperkuat status kesitimewaan ini (p. 106).

Salah satu esensi keistimewaan Yogyakarta yang paling nampak adalah keberadaan Sultan sebagai ikon kebudayaan yang sekaligus juga memiliki jabatan struktural gubernur. Mengetahui itu saja, sudah dapat ditebak bahwa peranan Sultan

cukup signifikan tidak hanya dalam ranah kebudayaan namun juga pemerintahan. Dalam artikelnya, Jaweng menyebut bahwa esensi keistimewaan DIY terletak pada pihak kepemimpinan daerah di mana kedudukan kepala daerah melekat dan berasal dari Kesultanan dan Pakualaman.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi masyarakat dalam dimensi sosial-politik agak canggung. Meskipun posisinya sebagai “milik raja” telah disetarakan dan berubah seiring dengan perjalanan historis, namun, masyarakat tetap hidup dalam wilayah kekuasaan sultan. Keberadaan Sultan/Paku Alam sebagai penguasa takhta Kesultanan Yogyakarta sekaligus pemegang jabatan kepala daerah, pada tataran tertentu, membuat KR sebagai alat bantu pemerintah mengesankan adanya usaha untuk membuat masyarakat berada di posisi yang tidak selalu “atas-bawah” melainkan berusaha dibuat seolah-olah sejajar.

B. Pembahasan

1. Pemberitaan KR dan Fungsi Pers

Membahas model pemberitaan KR peneliti lakukan dengan mengaitkannya dengan fungsi-fungsi pers. Pernyataan yang menyinggung soal “tanggungjawab” dan narasi “memperbaiki”, “mengingat”, dan sebagainya dapat ditelusuri dalam kajian akademis berikut ini. Siebert, Peterson, dan Schramm mengemukakan bahwa pada abad ke-20, terdapat gagasan bahwa industri pers, yang notabene dilindungi oleh Piagam Hak Asasi Manusia, harus memenuhi tanggungjawab sosial. Pemilihan model pemberitaan yang menempatkan warga dengan cara yang demikian dapat dicerahkan dari kutipan berikut:

...selain bertujuan untuk memberi informasi, menghibur, mencari untung (seperti halnya teori liberal), juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi... (Severin & Jr., 2014, p. 379)

Keempat unsur inilah yang dicoba untuk disajikan KR melalui berita-beritanya. Tidak semua berita mengandung keempat unsur ini sekaligus, namun hanya satu atau dua unsur saja. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya,

beberapa berita adalah contoh bagaimana KR memegang fungsi informatif dan fungsi untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi.

Gagasan lain ditawarkan oleh J. Herbert Altschull (1984) tentang model-model pers. Ia membagi pers ke dalam 3 kategori, yaitu model pasar, model komunis, dan model maju/berkembang (p. 384). Masing-masing ia kelompokkan ke dalam aspek prinsip dasar, tujuan jurnalisme, dan pandangan terhadap kebebasan pers.

Pemberitaan KR, secara umum memperlihatkan fungsi pers sebagai pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi, penggagas perubahan sosial yang menguntungkan, pelayan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka perubahan sosial, dan pemenuhan tanggungjawab sosial pers. Keempat ciri tersebut, menurut Altschull termasuk dalam model pers maju/berkembang. Untuk catatan, ciri pemenuhan hak untuk informasi beririsan dengan model pasar, namun tiga yang lain adalah ciri-ciri model maju/berkembang.

Untuk peranan media massa yang lebih luas dari koran, Rusi, dkk (2020), kelompok peneliti yang mengkaji bagaimana media-media digunakan dalam usaha pembentukan opini publik tersebut menemukan sebagai berikut:

Melalui observasi, peneliti melihat bahwa semenjak kebijakan PSBB diumumkan oleh pemerintah pusat diikuti berita penerapan di berbagai wilayah di Indoensia, seluruh media massa baik koran, radio hingga televisi secara terus menerus mengkampanyekan penerapan PSBB. (Rusi, Ujiantuti, & Nahar, 2020)

Studi yang sebelumnya telah disinggung di awal ini menemukan bahwa corak peranan media sebagai perpanjangan tangan pemerintah muncul dalam temuan mereka. Selain penggunaan media massa konvensional, Rusi, dkk juga menemukan adanya keterlibatan media lain dalam upaya tersebut, yaitu media daring dan media sosial presiden.

2. Posisi Masyarakat dalam Kacamata Historis

Keberadaan Sultan/Pakualaman dalam ruang Yogyakarta membawa pengaruh pada posisi masyarakatnya dalam tataran sosial-politik. Melacak bagaimana masyarakat diposisikan dalam dimensi kesejarahan dapat diamati pada karya tulis Soedarisman Poerwokoesoemo (1985). Secara historis, bagaimana posisi masyarakat (masih) dapat dilacak sejak sebelum daerah ini menyatakan bergabung dengan NKRI, lebih tepatnya pada saat kontrak politik antara Hindia-Belanda dengan Kasultanan Yogyakarta disepakati.

Apa itu kontrak politik? Kontrak politik merupakan dasar dari perundang-undangan, pemerintahan, dan peradilan dalam daerah-daerah swapraja. Hoedoyo, mendeskripsikan kontrak politik sebagai berikut:

Kontrak-kontrak politik ini pada hemat saya mengandung pembatasan terhadap kekuasaan dan wewenang Raja-raja yang dahulu tidak terbatas itu dan pada umumnya juga menentukan ruang lingkup wewenang Pemerintah di dalam daerah-daerah khusus. Dengan perkataan lain kekuasaan Raja dalam wilayahnya dibatasi dan tidak boleh meliputi orang dan hal-hal yang menurut kontrak-kontrak politik ditarik dari wewenang Raja. (Poerwokoesoemo, 1985)

Bila dicermati, definisi kontrak politik tersebut sesungguhnya telah memperlihatkan bagaimana besarnya kekuasaan yang dimiliki seorang raja, dan posisi rakyat tidak diragukan lagi berada di bawahnya. Kontrak politik tersebut kemudian nampak berusaha mengubah bagaimana relasi kuasa bekerja di dalam struktur Kesultanan Yogyakarta. Dengan membuat perjanjian yang membatasi wewenang dan kuasa Raja/sultan, pihak kolonial berhasil menegosiasikan posisinya di hadapan kesultanan.

Dalam sejarahnya, istilah sultan/raja mengalami perubahan arti. Pemaknaan terhadap sultan/raja yang dianggap satu dengan kerajaannya sudah tidak ada lagi. Kerajaan beserta seluruh isinya kini bukanlah milik pribadi seorang raja, yang dapat diambil dan dimiliki sekehendak hati.

Sebagai gantinya, istilah “tritunggal” digunakan untuk menjelaskan hubungan antara rakyat, raja, dan kerajaan. Raja dan rakyat adalah abdi kerajaan.

Kerajaan adalah jiwa yang meliputi raja maupun rakyat dan mengikatnya, ketiganya saling membutuhkan satu sama lain sehingga tidak satupun dapat ada bila yang lain tidak ada. Walaupun mengalami perubahan arti, namun rata-rata kesultanan menganggap seorang Sultan sebagai seseorang yang lebih mulia dari manusia biasa dan ditakdirkan untuk memerintah mereka (Poerwokoesoemo, 1985).

Penjelasan tersebut menggeser orientasi dari yang tadinya berfokus pada pribadi seorang “sultan” menuju fokus pada “kesultanan”, dan dalam kadar tertentu, hendak menyetarakan posisi masyarakat dengan raja. Tercapainya harmonisasi antara raja dengan rakyat adalah sebuah kondisi ideal yang bernama “kerajaan” dapat terbentuk.

Penelitian Poerwokoesoemo memang tak secara implisit menjelaskan bagaimana posisi masyarakat, namun kutipan dan beberapa penjelasannya di atas dapat dijadikan sebagai catatan untuk mendeteksi bagaimana masyarakat diposisikan.

Hasilnya, penetapan kebijakan dan sosialisasinya dilakukan dengan menghindari diksi-diksi semacam “memerintah”, “hukuman”, “sanksi”, lalu menggantinya dengan “mengajak”, “menghimbau”, “mengingatkan”, dan sebagainya dalam komunikasi publik.

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koran Kedaulatan Rakyat memiliki bingkai yang selaras dengan pemerintah DIY dalam memposisikan masyarakat. Selarasnya KR dengan pemerintah kemudian membuat KR mengambil peran yang selaras pula dengan yang berusaha dilakukan pemerintah. Masyarakat, dalam beberapa beritanya mendapat posisi yang kurang nyaman. Kurang nyaman, dalam hal ini peneliti maksud dengan kecenderungannya yang seringkali dipamerkan sebagai pihak yang seringkali “salah langkah” dan perlu diperbaiki secara agresif dalam pemberitaan dan proses produksinya. Sementara di sisi lain, kewibawaan penguasa muncul dengan menjelma menjadi pengingat dan penyadar perilaku masyarakat yang “ngawur” dan tak patuh.

Temuan ini menunjukkan bagaimana teori “tanggung jawab sosial” pers oleh Siebert, Peterson, dan Schramm berperan dalam berita-berita KR. Dalam kerangka fungsi pers oleh Altschull, model pers yang dominan dianut KR adalah model maju/berkembang. “Kolaborasi” KR dengan pemerintah daerah DIY menghendaki hal yang sama, yaitu perubahan sosial yang menguntungkan, yang dalam hal ini, adalah ketaatan masyarakat.

Dimensi sosial-budaya, dalam penelitian ini menegaskan turut serta dalam kecenderungan pemberitaan yang demikian. Keberadaan Sultan/Paku Alam sebagai ikon budaya dan sekaligus pemegang jabatan kepala daerah, ternyata tidak serta merta secara mutlak membuat masyarakat berada di bawah penguasa. Dengan megesankan bahwa penguasa dan masyarakat berada di tempat yang sejajar, KR berusaha menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjadi pemberi informasi, pengingat, dan juga memperbaiki perilaku masyarakat akan *physical/social distancing* melalui diksi yang tidak keras. Menegaskan kekhasan KR yang disebut “tak meledak-ledak”.

Relasi masyarakat-penguasa yang demikian tidak lepas dari aspek kesejarahan dan politik yang panjang. Melalui kontrak politik dengan Hindia-Belanda, makna raja dan kekuasaannya diubah dan dibatasi sedemikian rupa hingga ke level yang berbeda dari yang tadinya telah dipatuhi oleh masyarakat. “Kerajaan” menggantikan posisi raja sebagai pusat dari kerajaan. Raja/sultan kemudian disejajarkan dengan rakyat sebagai salah satu komponen dari sebuah kerajaan.

B. Keterbatasan Studi

Kondisi Covid-19 yang sedang melanda dunia saat studi ini dilakukan sangat membatasi akses peneliti pada beberapa narasumber, sehingga data wawancara yang didapat seharusnya bisa lebih optimal. Terbatasnya akses narasumber juga berimbas pada kurang mendalamnya aspek situasional dalam analisis.

C. Rekomendasi

Untuk studi dan riset di masa mendatang dapat memperluas objek penelitian dengan media selain koran. Selain itu juga dapat mengubah/menambah unit analisis tidak terbatas pada teks namun juga pada aspek visual lain seperti foto atau ilustrasi.

Daftar Pustaka

- Aditya, I. (2020, Maret 27). *Sosial Distancing, Syarat Mutlak Pencegahan Covid-19*. Retrieved from krjogja.com: <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/sosial-distancing-syarat-mutlak-pencegahan-covid-19/3/alodokter.com>. (2020, Mai 27). Retrieved from Alodokter: <https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-covid-19>
- Ar-Rasyid, A. I., & Yuniati, U. (2020). Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Media Online (Studi Pada detik.news Tentang PSBB Jabar Dihentikan, Ridwan Kamil: 100 Persen Daerah Siap AKB). *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1-12.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmanto. (2017). *KR dan Jurnalisme Kultural*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
- Database Peraturan BPK RI*. (2021, Juni 2). Retrieved from [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020#:~:text=PP%20No.%202021%20Tahun%202020,19\)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020#:~:text=PP%20No.%202021%20Tahun%202020,19)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D)
- Dhona, H. R. (2018). Komunikasi Geografi. *Jurnal Komunikasi*, 1-16.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. New York: Longman Publishing.
- Hamad, I. (2004). Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999). *Makara*, 21-32.
- Herdiana, D. (2020). Social Distancing: Indonesian Policy Response To The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 93-110.
- Herlinda, O. (2020, Maret 3). *Menimbang Peran Media dalam Menghadapi Pandemi*. Retrieved from Remotivi: <https://www.remotivi.or.id/amatan/575/menimbang-peran-media-dalam-menghadapi-epidemi>
- hopkinsmedicine.org*. (2020, Juli 15). Retrieved from John Hopkins Medicine: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-social-distancing-and-self-quarantine>
- Iswari, M. (2007). Kedaulatan Rakyat Saksi Jatuh Bangunnya Pemerintahan Indonesia. In T. R. Muhidin M Dahlan, *Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007)* (pp. 524-527). IBOEKOE.

- Jansson, A., & Falkheimer, J. (2006). *Geographies of Communication The Spatial Turn in Media Studies*. Sweden: Nordicom.
- Jaweng, R. E. (2013). Keistimewaan Yogyakarta: Babak Baru Yang Menyisakan Sejumlah Catatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 105-119.
- Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2017). *Analisis Wacana Teori & Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juwito. (2008). *Menulis Berita dan Feature's*. Unesa University Press.
- liputan6.com*. (2020, April 4). Retrieved from Liputan 6:
<https://www.liputan6.com/bola/read/4219461/4-alasan-pentingnya-social-distancing-untuk-cegah-virus-corona-covid-19>
- Maulana, A. (2020, Mei 1). *unpad.ac.id*. Retrieved from Universitas Padjadjaran:
<https://www.unpad.ac.id/2020/05/media-massa-oasis-informasi-di-tengah-pandemi/>
- Muqsith, M. A. (2020). Tantangan Baru Jurnalisme Dalam Pandemi Covid-19. *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*.
- Pamungkas, A. T., & Pramesti, O. L. (2021). Kebijakan Redaksional Media Lokal Di Yogyakarta Dalam Pemberitaan COVID-19 (Studi Kasus Kebijakan Redaksional di Harian Jogja dan Tribun Dalam Pemberitaan Covid-19). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 87-101.
- Pearce, K. (2020, Maret 14). *John Hopkins University Hub*. Retrieved from John Hopkins University: <https://hub.jhu.edu/2020/03/13/what-is-social-distancing/>
- Poerwokoesoemo, S. (1985). *Kasultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prabandono, B. A., & Mawardiningsih, W. (2020). Framing Pemberitaan "New Normal" di Media Lokal Online Solopos.com Bulan Juni-Juli 2020. *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO*, 89-102.
- Rachelita, Y. L., & Ispandriarno, L. S. (2014). *Fungsi Media Massa Lokal Sebagai Pewarisan Nilai Budaya (Analisis Isi Fungsi Pewarisan Nilai Budaya Dalam Berita Pahargyan Ageng GKR Hayu dan KPH Notonegoro di SKH Kedaulatan Rakyat Periode 13 Agustus-27 Oktober 2013)*. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/6570/1/Jurnal.pdf>
- Raditya, I. N. (2019, September 27). *Tirto*. Retrieved from Tirto.id:
<https://tirto.id/kedaulatan-rakyat-koran-pertama-setelah-ri-merdeka-dan-masih-eksis-eiNe>
- Rusi, M., Ujiantuti, E., & Nahar, L. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Membentuk Opini Publik Terkait Pemberlakuan PSBB. *Jurnal Syntax Transformation*.

Santoso, A. (2008). Jejak Halliday Dalam Linguistik Kritis Dan Analisis Wacana Kritis. *Bahasa dan Seni*, 1-15.

Severin, W. J., & Jr., J. W. (2014). *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana.

Wang, Y. (2021). A Critical Discourse Analysis of News Report on Covid-19 in People's Daily and The New York Times. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 49-62.

Wicaksono, P. (2020, Maret 21). *tempo.co*. Retrieved from nasional.tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1322282/diy-tetapkan-tanggap-darurat-corona-anggaran-masih-diusulkan/full&view=ok>

Wodak, R., & Meyer, M. (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: SAGE Publications Ltd.

Yanti, B., Mulyadi, E., Wahiduddin, Novika, R. G., Arina, Y. M., Martani, N. S., & Nawan. (2020). Community Knowledge, Attitudes, And Behavioral Towards Social Distancing Policy as A Means Preventing Transmission of Covid-19 In Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia (JAKI)*, 4-14.

<https://katadata.co.id/infografik/2020/03/26/strategi-di-negara-lain-dalam-menghadapi-corona>

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51974072>

<https://tirto.id/daftar-strategi-korea-selatan-redam-pandemi-corona-versi-dubes-eLmB>

Lampiran

Teks Berita 1



Teks Berita 2



Ruang Sosial Sambungan hal 1

Covid-19 saat ini pada posisi yang rentan. Kondisi ini sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi perekonomian masyarakat, referensi informasi yang digunakan. Juga perbedaan daya tanggap dan pemahaman terhadap terhadap pesan edukasi dalam penanganan Covid-19 hingga pada sentimen pribadi. Tanpa pengelolaan baik, akan menimbulkan kegaduhan bahkan konflik antar anggota masyarakat.

Tingkat pendidikan memberikan pengaruh terbesar dalam penangkapan situasi ini. Pemahaman dan kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 diterima sebagai hal yang rasional dan perlu dilakukan. Hal ini dijumpai pada komunitas masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik. Pada masyarakat lain dengan tingkat pendidikan yang beragam, situasinya jauh berbeda.

Praktik praktik *lockdown* kampung secara ketat adalah salah satu wujudnya. Pihak luar yang tidak dikenal dilarang keras memasuki kampung dengan alasan apapun. Ironisnya, pos-pos penjagaan digunakan sebagai tempat ngumpul-ngumpul yang justru kontraproduktif dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, seperti berkumpul tidak mengenakan masker.

Kondisi perekonomian masyarakat secara jelas mengganggu aktivitas anggota masyarakatnya. *Stay at home dan work from home* hanya bisa direalisasikan anggota masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Sementara itu, anggota

bahkan merah, juga berbeda-beda antarpemuka agama dan tokoh masyarakat. Yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kecenderungan menyalahkan protokol kesehatan dan imbauan pemerintah.

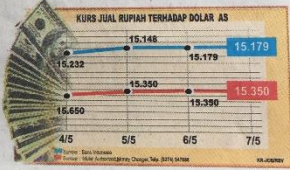
Di samping beberapa faktor di atas, koherensi dan sentimen pribadi terkadang menyilap dan mempengaruhi keputusan para relawan di lapangan maupun keputusan para tokoh masyarakat. Hal ini sangat tampak pada aktivitas kesehatan masyarakat. Para petani yang biasanya bebas keluar masuk dengan jalan terdekat, terpaksa harus memutar melalui pintu masuk yang dijaga relawan.

Kegagalan mengelola berbagai faktor di atas dapat menimbulkan permasalahan baru yang

Justu bisa berdampak panjang pascapandemi Covid-19. Karenanya, evaluasi terhadap berbagai prakrisis penanganan dan penanggulangan Covid-19 di masyarakat perlu dilakukan secara serius. Baik oleh anggota masyarakat yang terkait maupun institusi pemerintah, utamanya pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Jangan sampai modal sosial dan kegotongroyongan dalam penanggulangan pandemi Covid-19, yang ditunjukkan sebagai besar masyarakat kita, berubah menjadi gejala-gejala disharmoni sosial yang kontraproduktif.

(Penulis adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional dan Prodi Pembinaan Wilayah Fakultas Geografi UGM-y)

si transmisi dan tingkat penularan Covid-19 saat semester



Prakiraan Cuaca Jumat, 8 Mei 2020

Wilayah	Pagi	Petang	Malam	Duamalam	Suhu	Kelambaban
Utara	☀️	☁️	☁️	☁️	23-33	65-90
Barat	☀️	☁️	☁️	☁️	23-33	65-90
Selatan	☀️	☁️	☁️	☁️	24-33	65-90
Timur	☀️	☁️	☁️	☁️	24-33	65-90
Yogyakarta	☀️	☁️	☁️	☁️	24-33	65-90

☀️ Cerah ☁️ Berawan 🌧️ Udaa Kudu 🌪️ Hujan Lokal 🌩️ Hujan Petir

Teks Berita 3

KR GROUP
http://www.krjogja.com

Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1945

REKENING BRI
NO. : 0409.01.000135.304
A/n : PT. BP. KEDUALATAN RAKYAT
No. Rekening BRI MASA TRANSFER DI NOMOR AS. No. 0206.0001

MINGGU LEGI 10 MEI 2020 (17 PASA 1953 / TAHUN LXXV NO 218) HARGA RP 3.000 / 16 HALAMAN

Penyerahan BST di Kulonprogo

Warga Antusias, Abaikan 'Jaga Jarak'

WATES (KR) - Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo secara simbolis menyerahkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebesar Rp 600.000 kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Sabtu (9/5) di Gedung Kesenian Wates.

Proses pembagian BST bagi warga kurang mampu yang terdampak pandemi virus Korona tersebut diwarnai desak-desakan sehingga mengabaikan *social distancing*.

Pencairan BST dilaksanakan PT Pos Cabang Wates bekerja sama dengan Pemkab Kulonprogo. Sabtu kemarin, BST diserahkan kepada 1.200 penerima dari enam kalurahan di Kapanewon Wates. Dua kalurahan lainnya sudah menerima bantuan serupa lewat PT Pos, Jumat (8/5).

Kepala PT Pos Cabang Wates, Irwan Agus Susilo mengakui, sebenarnya proses penyerahan BST. Kendati demikian pihaknya sudah berupaya menerapkan protokol kesehatan selama berlangsungnya pembagian BST. "Tapi karena tingginya antusias masyarakat untuk mendapatkan BST, menyebabkan

warga yang antri tidak mengindahkan mekanisme jaga jarak.

Meraka tidak mematuhi prosedur tetap (protap) jaga jarak. Padahal penerapan *social distancing* mutlak dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus Korona. "Sebenarnya sudah kami sediakan dan jalmnya sudah diatur. Tetapi warga datang bersamaan, sehingga terjadi kerumunan," kata Irwan Agus Susilo.

Guna mencegah semakin parahny kerumunan warga, pihak penyelenggara mengambil langkah dengan menutup gerbang Gedung Kesenian Wates dan pencairan dana BST dilakukan bagi warga yang sudah antri di dalam. Sementara bagi warga yang belum datang, diserahkan pada pukul 14.00 WIB. "Untuk sementara kami tunda dulu

dan diset ulang. Permasuk untuk penyerahan di kecamatan lain besok (Minggu hari ini) akan diatur lebih ketat agar tidak terjadi penumpukan," jelas Irwan Agus.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinas PA) Kulonprogo, Yohanes Irianto menjelaskan, di Kulonprogo ada 17.643 penerima BST yang bersumber dari Kementerian Sosial. Setiap penerima akan mendapatkan Rp 600.000 perbulan, selama tiga bulan. "Pencairan ini untuk BLS April, teknisnya lewat Kantor Pos," ungkapnya.

Tentang terjadinya kerumunan massa yang relatif banyak, Irianto mengatakan, sebenarnya undangan sudah terbagi dalam jam-jam tertentu, tetapi tidak dihiraukan oleh KPM, karena mungkin keburu untuk menerima bantuan, akhirnya terjadi kerumunan. Total penerima bantuan di Kulonprogo ada 20.168 KPM. Dari jumlah tersebut, 17.643 di antaranya disalurkan melalui layanan Pos Indonesia. Sisanya lewat transfer BRI, BNI dan ETPN. "Sebenarnya, warga tidak perlu terburu-buru. Semua KPM yang terdaftar pasti dapat bantuan, tegasnya.

* Bersambung hal 7 kol 5

17 orang
mendidi
dianbil
KAM-1

hal 1
yang ter
MI akan
dengan
Peru-
"BP2M
keputah-
sal yang
ibungin
tanggai
(At)-d

hal 1
di test di
dengan
mangsa
lakukan
tah baik
belum

angapi
RD tar-
a (PM)
in rapid
lakukan
pidi test
atta de-
di test)
la kelu-
desa
ri sejak

shikan,
beber-
ri berne-
nesia
kasan
nyah
ah ma-
dengan
wari

wabah Covid-19. Mengoptimalkan, wabah Covid-19 bisa segera ditasi. Alurannya mengajarkan, Allah tidak akan memberi cobaan yang lebih dari kemampuanmu. **Yakhalifallahu nafsan illa wusaha.** Allah tidak membebani seseorang me-

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Peringatan Kuzul Qursan menjadi momentum untuk memahami pesan Al Quran dan mengamalkannya sebagai pedoman dalam membangun peradaban yang unggul, maju dan mulia. **Tabaphy.** (At)-z



Seorang penerima BST sedang diambil gambarnya, warga lain antri berdesak-desakan.

Warga... Sambungan hal 1
Salah satu KPM, Eka Desi Setyawati (29) menyayangkan penyaluran BST yang seragam itu. Menurut Eka, penyaluran BST akan lebih baik jika dilaksanakan di masing-masing kalurahan guna meminimalisir adanya kerumunan. "Mungkin kalau diserahkan di tiap kalurahan akan lebih baik," tandas perempuan asal Dusun Sanggrahan Lor Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates itu. **Kapalek Wates Kompol Endang Su-**

Relawan Sambungan hal 1
Ditugaskan pada yang melakukan pendataan adalah Relawan Desa Lawan Covid-19, yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa dan diketuai langsung oleh Kepala

Teks Berita 4

Suaranya Rakyat
Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1983

8 APRIL 2020 (14 RUMAH 1953 / TAHUN LXXXV NO 189) HARGA RP 3.000,- 16 HALAMAN

Jakarta Siapkan Penegakan Hukum DIY Lakukan Prosedur PSBB

YOGYA (KR) - DKI Jakarta menegatkan kewenangan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kewenangan tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan Tersebut Agus Purnomo.

Yang Dirang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Dilang kegiatan yang beres-beres
- Mengadakan pertemuan yang dihadiri banyak orang
- Mengadakan acara pernikahan
- Transporasi yang berlimpah dengan
- Paruh-pembatasan tempo gagah

Desah yang boleh PSBB
- Kemas pusat virus dan kematan akibat virus karena aktifitas masyarakat hilang
- Kematan daerah tersebut, berkaitan dengan kebutuhan dasar, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, kewenangan pelaksanaan PSBB diserahkan kepada pemerintah daerah yang memang untuk keperluan pokok.

hal 1
sian
lacak
u pu-
larah
aku?
Iran
ARS-
sai-
julan,
am be-
rang

1 jah
Mata
sian di
sila sa-
gai su-
u.2 kali
nyata-
a 3 kali
tinggu-
y untuk
super-
rakan

lomen
nurtas
Mada-d

awit,
etik,
men.

ssam
swan
sasi
uhan,
s Alai

mbal
sah,
Nhu,
Tim-d

hal 1
meninggal. Selesai (74) pukul 06.00 pasien dengan inisial 7 positif Covid-19 dan WB. Menurut Kabag Hukum dan Humas 10 PDP

DIY Sambungan hal 1
mendukung dan memfasilitasi-kan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat," ujar Anies.

DI DIY Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X prosedur PSBB sudah dilaksanakan. Namun secara alternatif, PSBB belum dikecualikan aspek adat-istiadat. Kebijakan PSBB kini ramai digulirkan di tengah wabah virus Korona.

Sejauh ini Pemda DIY masih mengumpulkan verifikasi data sebagai langkah (PSBB). Hingga data yang masih dituliskan yakni puncak pemudik ke Yogyakarta.

Gubernur DIY dalam wawancara di sejumlah media televisi secara langsung mengatakan, sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan rencana PSBB, warga di Yogyakarta sudah melakukan hal serupa. Jika PSBB mengacu kepada aturan Kementerian Kesehatan, maka sebelumnya DIY mengambil dasar hukum dari undang-undang penanggulangan bencana.

Pemda DIY langkah benayanya untuk membatasi lonjakan penduduk ke DIY agar tidak melonjak ledakan kasus virus Korona di DIY kedepannya. Untuk itu, Pemda DIY masih melakukan konsolidasi kebijakan-kabijakan terkait pembatasan pemudik dengan Gubernur DIY.

Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, agar Gubernur se-Jawa berkoordinasi lebih jauh untuk mengkonsolidasikan diri terkait kegiatan mudik. Sebab di satu sisi tidak mungkin melarang pemudik, di sisi lain

kali mereka bisa diminimalisasi tim dilantu dengan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta agar bisa membatasi pemudik.

"Jumlah pemudik baru kira-kira 30 persen yang datang saat ini, jika itu terjadi lonjakan pemudik maka kapan virus Korona di DIY bisa kita putus. Apabila kita tidak tahu kapan puncak pemudik datang ke daerah, kita akan kesulitan untuk memprediksi. Jadi kesehatan kita memosisi mencari cara dan mengambil kebijakan seperti mempersilakan pemudik berbondong-bondong kembali ke daerah," kata Sultan HB X usai melakukan teleconference Gubernur Jawa-Lampung dengan Pj Menteri Dalamnegeri Luthfi Basrah Pardalisari di Gedung Pradimosono Kepatihan, Selasa (74) malam.

Sultan HB X mengatakan agar jumlah pemudik yang saat ini 30 persen tersebut agar tidak bertambah. Sebab disamping sudah ada di desa-desa dengan mandiri akan diberikan vitamin sebagai lambunya antibodi.

Dengan harapan tumbuh antibodinya untuk memukul virus yang kemungkinan ada pada dirinya.

"Karena memang tidak ada obatnya, satu-satunya cara adalah kondisi badan yang fit sehingga antibodinya tumbuh untuk memukul virus yang akan masuk. Saya berharap 2.880 ODP ini negatif semua dan jika masih ada virus bukan merupakan lonjakan tetapi mendatar sehingga kita bisa mengantisipasi pada kondisi berikutnya agar tidak muncul gelombang kedua. Kami ingin bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat sehingga tidak berdampak signifikan terhadap aspek perekonomian," ungkapnya.

Tempah Kepala Dinas Perhubungan DIY Tatip Agus Riyanto mengungkapkan, Pemda DIY akan melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi orang dari luar daerah yang pulang ke kampung halaman dan kemungkinan bisa menyebarkan Covid-19. Guna mengantisipasi hal itu dilakukan beberapa rekayasa misalnya pemudik tidak boleh berbondong-bondong.

(Editor:Rai-d)

16.448	16.824	16.609
16.356	16.300	16.770
16.356	16.300	16.609
16.448	16.824	16.609

Teks Berita 5

Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1945
30 MEI 2020 (7 SAWAL 1953 / TAHUN LXXV NO 234)

SUMBERAN DOMPET KR "COVID-19"
REKENING BRI
NO : 0409.01.000135.304
A/n : PT. BP. KEMAUATAN RAKYAT

HARGA RP 3.000 / 20 HALAMAN

SABTU LEGI

Persepsi Masyarakat DIY

Penerapan Protokol Kesehatan Laman Covid-19	
• Sesuai Protokol Kesehatan	65 %
• Tidak Sesuai Protokol Kesehatan	20,5 %
Pembukaan Tempat Ibadah	
• Sesuai Dibuka	72,8 %
• Tidak Sesuai	17,6 %
Sangat Pembukaan Kegiatan Sekolah/Perguruan Tinggi	
• 60 %	
• 65 %	
• 68,5 %	Ingin Pasar dan Mall Dibuka

Sumber MDKX UGM

ADAPTASI 'NEW NORMAL' Pajuhadi guding, Sudarini, mengenakan pelindung wajah saat melayani pembeli di kasutan Demangan, Yogyakarta, Jumat (29/5).

✓ Sultan : Bukan Berarti Bisa Bebas 60 Persen Warga DIY Setuju 'New Normal'

YOGYA (KR) - Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM melakukan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat DIY terkait upaya pencegahan penularan Covid-19 di DIY. Survei dilakukan dengan cara wawancara online dengan jumlah responden sebanyak 492 orang/warga yang tersebar di lima kabupaten/kota se-DIY, pada 26-28 Mei kemarin.

Hasilnya, sebagian besar responden (warga DIY) setuju pemerintah menerapkan new normal (kenormalan baru) disertai pelanggaran membuka kembali kegiatan perekonomian dan tempat ibadah dengan standar protokol kesehatan secara ketat.

Anggota Tim Survei Satria Aji Imanan MPA mengatakan, sekitar 60 persen responden setuju pemerintah memberlakukan penerapan 'New Normal' dengan membuka kembali pasar, pertokoan, mal dan tempat ibadah. "Lebih dari separuh responden menyetujui jika ada keputusan itu meskipun dengan persyaratan penerapan protokol kesehatan yang ketat," terang Satria Aji kepada wartawan saat menyampaikan laporan hasil survei secara webinar, Jumat (29/5).

Lebih detail Satria Aji menyebutkan, sebanyak 61,8 persen responden setuju penerapan protokol kesehatan, 28,5 persen tidak setuju dan sisanya setuju namun dengan protokol biasa. Kemudian, sebanyak 72,8 persen mengizinkan tempat-tempat ibadah dibuka. Selain itu responden yang menginginkan agar Pemda DIY membuka kegiatan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi sebanyak 65 persen, dan yang ingin pasar dan mal dibuka sebanyak 74,6 persen.

Anggota peneliti lainnya, Citra Sekarjati MFA mengatakan, survei ini dalam rangka untuk mengetahui persepsi penduduk DIY terkait

* Bersambung hal 7 kol 1

ANGKA KESEMBUHAN TERUS MENINGKAT
Analisis KR Kasus Positif Muncul Lagi

WPH PNS Diperpanjang
JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur

60 Persen

warga DIY sebagai daerah percontohan penerapan new normal. Seperti diketahui, Pemda DIY tidak memberlakukan PSBB, melainkan menerapkan status langkap darurat bencana Covid-19.

Menanggapi hasil survei tersebut, Guru Besar Bidang Kebijakan Publik dan Kependidikan UGM Prof Dr Muhadjir Darwin mengatakan survei ini belum bisa mewakili seluruh kelompok masyarakat DIY karena dilakukan wawancara secara online. "Artinya yang mengisi kuesioner adalah mereka yang sudah melek teknologi atau sudah akrab dengan dunia online sementara belum mewakili warga yang berkemungkinan di pasar," katanya.

Meski begitu, menurut Muhadjir Darwin, survei ini layak juga untuk dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Sementara di tingkat bawah, masih banyak warga yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan standar Covid-19, seperti memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. "Jika ini tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan warga dibarengi, harapan kita ada pengurangan insiden lanjutan Covid-19 sulit terjadi dan pemerintah perlu bertindak tegas atas kondisi ini," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa masalah utamanya dibekukan 'New Normal' di DIY, namun demikian bukan berarti masyarakat bisa bebas dan tidak mematuhi protokol kesehatan. "Karena pemertanian dan pengawasan akan terus dilakukan. Misalnya hotel dan restoran dipastikan bisa mengontrol penyebaran Covid-19 di areanya. Mula dari mengontrol untuk pengujian bisa menjaga jejak, melengkapi fasilitas cuci tangan, pembersihan berkala untuk fasilitas yang banyak dipegang orang dan seterusnya. Kalau nggak sanggup seperti itu, dikawatirkan jadi persoalan baru," terang Sultan.

Sejauh ini sejumlah persiapan terkait dengan pelaksanaan 'New Normal' terus dilakukan oleh Pemda DIY. Tentunya sebelum memutuskan untuk memberlakukan 'New Normal' harus dilihat terlebih dahulu perkembangan kasus Covid-19 di DIY, apakah sudah melandai atau belum. Pasalnya ketika DIY sudah memasuki era new normal, ada banyak hal yang perlu diperhatikan.

"Rencananya Selasa besok masih akan dilakukan pertemuan dengan asosiasi, karena kami tidak akan tergesa-gesa dalam memutuskan new normal. Jadi perkembangannya kasusnya bagaimana perlu dicermati, termasuk yang di RS," harapannya.

Harapan kita kan kasusnya negatif semua jangan ada yang positif dalam arti yang PDP dan sebagainya. Kalau itu sudah memungkinkan turun dan diyakini tidak fluktuatif, baru kita bisa diberlakukan 'New Normal'," kata Sri Sultan sesuai melakukan teleconference bersama Mendagri terkait dengan inovasi masing-masing daerah dalam menerapkan 'New Normal' di Kompleks Kepatihan, Jumat (29/5).

Sultan mengungkapkan, dalam pertemuan virtual yang dilaksanakan bersama Mendagri, sempat dilakukan sejumlah pembahasan mengenai lomba bagi daerah untuk bisa membuat perencanaan tentang 'New Normal' atau kehidupan baru. Dengan adanya gambaran jelas tersebut, diharapkan masyarakat sudah benar-benar siap. Misi untuk resto, masyarakat yang datang ke sana dipastikan sudah cuci tangan, duduk berjarak dan sebagainya. Jadi adanya perlombaan tersebut diharapkan juga menjadi tempat sosialisasi supaya masyarakat dapat memahami kehidupan baru tidak hanya pandemi Covid, tapi akan terjadi terus.

Kepala Badan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wabowo menambahkan, Pemda DIY tengah bersiap menyambut 'New Normal' dengan menggelar lomba inovasi bagi Pemda terkait kesiapan Pemda yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendorong aktivitas kehidupan masyarakat menuju 'New Normal' di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, Kemendagri menggelar lomba inovasi bagi Pemda terkait kesiapan Pemda The New Normal di tengah masa pandemi Covid-19 dari inovasi Pemda lainnya yang sudah dilakukan 2018 hingga 2019. Terkait lomba inovasi di tengah masa pandemi Covid-19 yang harus diserahkan pada 8 Juni 2020 ini mempunyai 7 item yang dilombakan, antara lain inovasi di pusat pemerintahan, inovasi transportasi publik, inovasi sektor pariwisata dan sebagainya.

"Inovasi itu akan dikemas dalam bentuk video dengan durasi maksimum 2 menit kemudian diklaim ke Balitbang Kemendagri yang akan dinilai oleh beberapa kementerian terkait. Termasuk Kementerian Perindustrian dan Ekonomi Kreatif (Kemendagindukraf), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan kementerian terkait lainnya," kata Budi kepada KR.

Budi menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang masuk item perlombaan inovasi bagi Pemda tersebut. DIY mempunyai beberapa inovasi yang telah dimanfaatkan selama pandemi Covid-19 selama ini sehingga bisa diterapkan di daerah lainnya. Misalnya program aplikasi Pembinaan Koperasi dan UKM Berdaya Saing dan Khas Cheng Jaga atau 'Si Baku Jaga' yang digunakan untuk memantau sekaligus memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pelaku UKM dan Koperasi yang terdampak Covid-19. (Dwi/Ria/d